

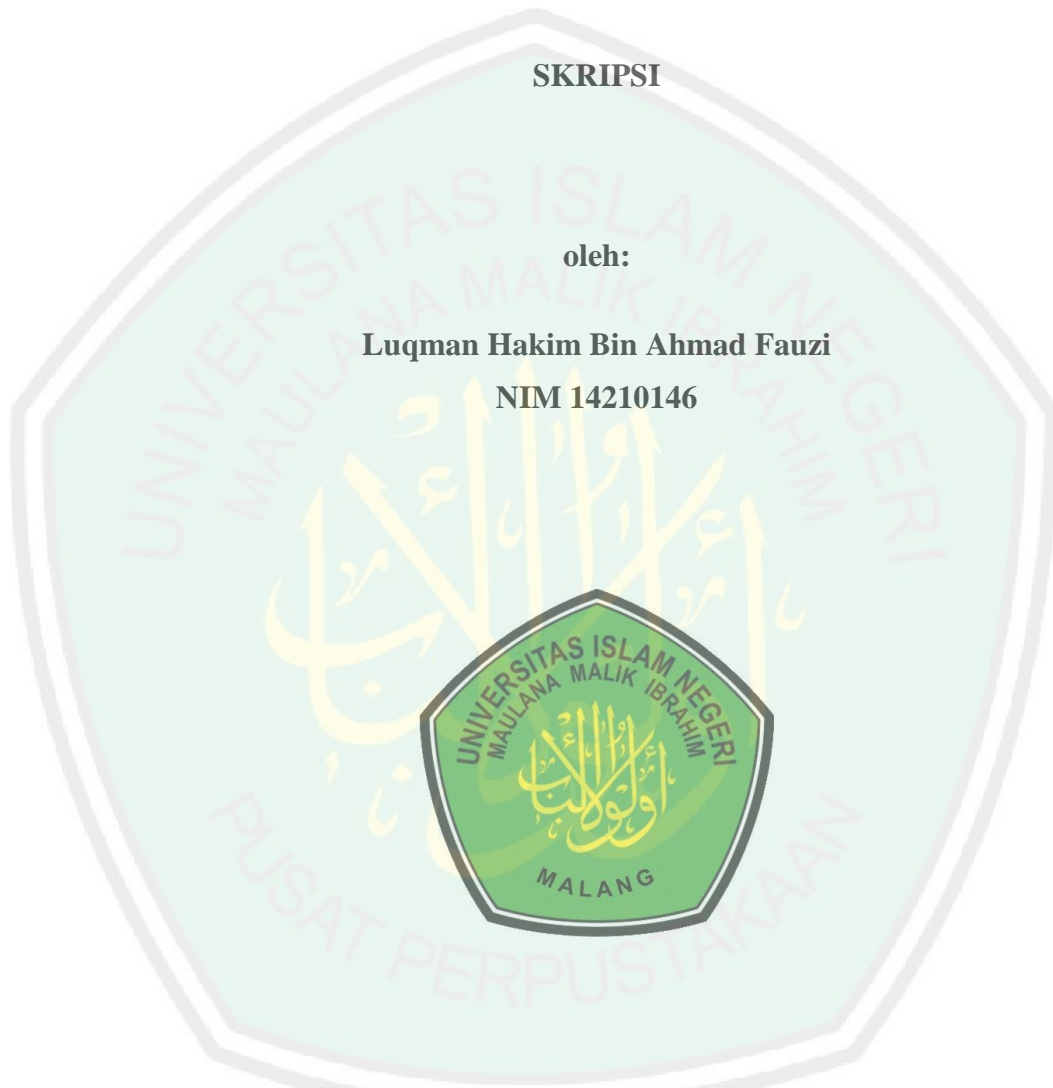
**PERAN PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA
PENCERAIAN (STUDI PADA MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR)**

SKRIPSI

oleh:

Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi

NIM 14210146



JURUSAN STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PERAN PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA
PENCERAIAN (STUDI PADA MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR)**

SKRIPSI

Oleh:

Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi
NIM 14210146



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

Demi Allah,

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PENCERAIAN (STUDI PADA MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 November 2018
Penulis,



Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi
NIM 14210146

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi, NIM: 14210146 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA
PENCERAIAN (STUDI PADA MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 22 November 2018
Dosen Pembimbing,


Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512 05200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi, NIM 14210146, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PENCERAIAN (STUDI PADA MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Ahmad Wahidi, M.HI.**
NIP: 197706052006041002

()
ketua


2. **Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.**
NIP: 196512052000031001

()
Sekretaris

3. **Dr. H. Roibin, M.HI.**
NIP: 196812181999031002

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,

()
Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP:196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/IS/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Lengkap : Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 14210146
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.
Judul Skripsi : **PERAN PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PENCERAIAN (STUDI PADA MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 4 April 2018	Proposal	
2	Jum'at, 6 April 2018	Revisi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 25 April 2018	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 9 Mei 2018	BAB I-III	
5	Jum'at, 19 Oktober 2018	Revisi BAB I-III	
6	Kamis, 1 November 2018	BAB IV-V	
7	Kamis, 8 November 2018	Revisi BAB IV-V	
8	Senin, 12 November 2018	Revisi BAB IV-V	
9	Rabu, 21 November 2018	Abstrak	
10	Kamis, 22 November 2018	ACC	

Malang, 22 November 2018
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

(QS. at-Taubah: 105).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PERAN PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PENCERAIAN (STUDI PADA MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR)** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan doen pembimbing peneliti,ucapan terima kasih peneliti hулurkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dengan keikhlasannya telah banyak memberikan motivasi serta referensi ilmu kepada peneliti dalam mengerjakan penelitian
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen wali peneliti sekaligus motivator dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih peneliti hулurkan atas waktu yang beliau berikan selama berada di Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Falkutas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberi ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
5. Kedua orangtua saya Bapak Ahmad Fauzi Bin Mohd Banon dan Ibu Zuleha Binti Mohamad Yusuf , terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah peneliti. Terima kasih kepada saudara/saudariku Zawin Najah dan Ahmad Syarafuddin Al-fathy, terima kasih atas dukungan dan semangat motivasi yang diberikan.
6. Terima kasih kepada saudari Syaza Afiqah, yang menjadi motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

- ini.
7. Terima kasih teman-teman organisasi UKM UNIOR dan PKPMI Malang atas dukungan, motivasi dan pengalaman selama saya di Indonesia.
 8. Terima kasih teman-teman Falkutas Syariah angkatan 2014. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa depan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 9. Terima kasih teman-teman Malaysia angkatan 2014. Yang bersama-sama berjuang hingga akhir dan sentiasa menjadi partner yang sering memberi dukungan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, keikhlasan, dan teruslah berkarya.
 10. Dan terima kasih tak terhingga peneliti ucapkan kepada pihak-pihak yang belum sempat peneliti sebutkan satu persatu. Untuk guru-guru, dosen, serta organisasi yang telah membantu peneliti menjadi dewasa dan menyelesaikan kewajiban di jenjang pendidikan Strata satu ini.

Segala hasil yang peneliti serta sempurna untuk membalas budi atas kebaikan, kemudahan, bantuan, serta dukungan selain seucap doa semoga Tuhan membalasnya, Peneliti sadar dengan segala keterbatasan yang ada tentunya karya ini masih perlu diperbaiki dan jauh dari kesempurnaan. Oleh itu, peneliti mengharap saran dan kritik yang membangun dan mengharap nantinya dapat mengurangi kesalahan. Semoga ketidak sempurnaan penelitian ini, mampu menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dan keilmuan

secara khusus dan bidang lainnya,

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin

Malang, 20 November 2018

Peneliti,

Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi

NIM 14210146



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئ - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص.....	xxv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8

F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Sejarah dan Undang-Undang Peguam Syarie.....	17
2. Pengertian Peguam Syarie	23
3. Peranan Peguam Syarie	24
4. Etika Peguam Syarie.....	26
5. Mediasi	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Data	42
1. Lokasi Penelitian	42
2. Kondisi Objektif Mahkamah Syariah Selangor.....	43
3. Sejarah Singkat Penubuhan Mahkamah Syariah Selangor.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
1. Peran Peguam Syarie Dalam Upaya Menekan Angka Penceraian	

Di Mahkamah Syariah Selangor	43
2. Kendala Peguam Syarie Dalam Upaya Menekan Angka Penceraian	
Di Mahkamah Syariah Selangor	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	



DAFTAR TABEL

TABEL I : Statistik Kasus Penceraian Tahun 2015-2017 Di Selangor	5
TABEL II : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
TABEL III : Senarai Enakmen/Ordinan/Akta Berhubung Peruntukan Peguam Syarie Mengikut Negeri	20
TABEL IV : Senarai Terkini Kaedah/Peraturan Peguam Syarie Mengikut Negeri	22
TABEL V : Pihak-pihak Peguam Syarie yang di wawancara.....	39
TABEL VI : Pihak-pihak Klien yang di wawancara	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Mahkamah Syariah Selangor.....43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
Lampiran 2 : Surat-surat
Lampiran 3 : Undang-undang



ABSTRAK

Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi, NIM 14210146, 2018. **Peran Peguam Syarie Dalam Upaya Menekan Angka Penceraian (Studi Pada Mahkamah Syariah Selangor)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah, Falkutas Syari'ah, Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum

Kata Kunci: Peguam Syarie, Penceraian, Mahkamah Syariah.

Peguam syarie ialah orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang hukum syarak, menjadi peguam syarie bagi mewakili pihak-pihak dalam apa-apa prosidang di dalam mahkamah syariah. Keberadaan peguam untuk mewakilkan tergugat atau penggugat dalam persidangan sering kali dipertikaian berkaitan etika membela kliennya. Seperti kita tahu bahwa peguam syarie ada dikarenakan untuk membela nasib dan keadilan seseorang kliennya agar tidak kalah dalam kasus yang dipertikaikan. Akan tetapi, nilai seorang peguam syarie disisi Islam dapat dilihat apabila ia lebih menegakkan keadilan yang sebenarnya bukan hanya keadilan kliennya. Data tuntutan penceraian di negeri Selangor dari tahun 2015 hingga 2017 semakin meningkat dari 5.955 menjadi 6.226 angka ini menaik sebanyak 4.5 persen sehingga para peguam syarie harus memainkan peran untuk menekan angka penceraianya.

Berdasar alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait peran peguam syarie dalam menekan angka penceraian dengan pokok bahasan 1. Bagaimana tindakan peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia?, 2, Apakah kendala yang dihadapi peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia?.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Jenis penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian peneliti ini, data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Pejabat Guaman Asri Musa & Co. Gombak, Selangor, Malaysia.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Tindakan dan peran peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor adalah mendamaikan kliennya dengan pendekatan keluarga untuk dijadikan orang tengah dalam kasus yang terjadi, dan menasihati kliennya untuk mencari titik persamaan agar penceraian tidak terjadi. Selain itu, bekerjasama dengan badan pemerintah untuk melaksanakan program penerangan tentang kewajiban dan tanggungjawab suami istri, dan memberi saran kepada klien untuk menjaga komunikasi antara pasangan dengan baik. Seterusnya, menjelaskan hak-hak dan kewajiban suami istri melalui pendekatan organisasi yang wujud di masyarakat. 2. Kendala yang dihadapi peguam syarie ialah kurangnya keuangan dari badan pemerintah untuk melaksanakan program penerangan terutamanya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri sehingga sering terjadi sengketa antara pasangan dan kebiasaannya klien tidak mendengarkan saran yang diberikan hanya menginginkan keadilan yang menguntungkan dirinya. Selain itu, tidak ada kerjasama yang baik dari pihak keluarga untuk membantu agar psangan tidak bercerai dan antara pasangan tida menjaga komunikasi dengan baik.

ABSTRACT

Luqman Hakim Bin Ahmad Fauzi, NIM 14210146, 2018. **The Role of Shariah Lawyer in the Effort to Reduce the Number of Divorce (Study at Selangor Shariah Court)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah Department, Shariah Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum

Keyword: *Shariah Lawyer, Divorce, Shariah Court.*

The lawyer is a Muslim who has deep knowledge on Islamic law, being a Shariah lawyer to represent the parties in any proceedings in the Shariah court. The existence of a lawyer is to represent the defendant or the plaintiff in the trial is often disputed regarding the ethics in defending his client. Apart from that, the shariah lawyer is defending the fate and justice of one of his clients not to lose in the disputed case. However, the value of a Muslim-based shariah lawyer can be seen when it is more upholding justice that is actually not just the client's justice. Divorce rate is recorded from Selangor Shariah Court in 2015 to 2017 has risen from 5,955 to 6,226 points higher by 4.5 percent so that shariah lawyer should play a role to reduce divorce rates.

Based on that reason, the researcher is interested to conduct a research related to the role of shariah lawyer in reducing the divorce rates with these arguments ;1. How the action taken by shariah lawyer in term of reducing divorce rates in Selangor Shariah Court, Malaysia ?, 2.What are the obstacles faced by shariah lawyer in attempt of reducing divorce rates in Selangor Shariah Court, Malaysia ?

In this study, the type of research used by researchers is empirical research or research field. This type of empirical study was conducted to obtain accurate research results based on the data obtained from the field. In this study, the data used is the results of interview and documentation which are conducted at the Legal Office of Asri Musa & Co. Gombak, Selangor, Malaysia.

The results of this study are as follows. 1. The roles of a lawyer in the effort to reduce divorce in the Selangor Syariah Court is to reconcile his client with their family as middleman in the case, and advise his client to find the equality point in avoiding divorce to occur. In addition, government have to provide supports such as to conduct an awareness program about responsibilities of a husband and wife, and advise clients to maintain good communication between partners. Next, explaining the rights and obligations of the husband and wife through any organization within society. 2. The obstacles faced by the shariah lawyer are the lack of financial support from government to conduct an awareness program especially on the rights and obligations of husbands and wives until the dispute between the couple remain occur and the clients become self-centered and ignore the advice given to them and only tend to obey and commit on things that benefit them. In addition, there is no cooperation given from the family in order to help avoiding the divorce and in maintaining good communication between the couple.

ملخص

لقمان حكيم بن أحمد فوزي ، رقم الطالب ١٤٢١٠١٤٦ ، ٢٠١٨ . دور المحامي الشرعي في محاولة للضغط على عدد الطلاق (دراسة على المحاكم الشرعية سيلانجور). أطروحة . قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، فالكوتاس السارية ، الجامعة الدولية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف : الدكتور الحاج سيف الله ، بكالوريوس في القانون ، الماجستير في العلوم الإنسانية.

كلمات البحث : المحامون الشرعيون ، الطلاق ، المحاكم الشرعية.

المحامي الشرعي هو مسلم لديه معرفة كافية بالشريعة الإسلامية ، كونه محامياً سورياً يمثل الأطراف في أي إجراءات في المحكمة الشرعية. وكثيراً ما يكون وجود المحامي الشرعي يمثل المدعى عليه أو المدعي في المحاكمة محل نزاع بشأن أخلاقيات الدفاع عن موكله. كما نعلم أن المحامي الشرعي من المقرر أن يدافعوا عن مصلح موكلهم حتى لا يخسروا القضية المتنازع عليها. ومع ذلك ، يمكن النظر إلى قيمة المحامي الشرعي القائم على أساس إسلامي إذا كان الأمر يتعلق بالتمسك بالعدالة وليس فقط عدالة موكله. وارتفعت بيانات مطالبات الطلاق من سيلانجور ، من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ ، من ٥٩٥٥ إلى ٦٢٢٦ نقطة بنسبة ٤,٥ في المائة ، لذا على المحامي الشرعي لعب دور لقمع معدلات الطلاق.

وبناءً على هذا السبب ، يهتم الباحث في إجراء بحث يتعلق بدور المحامي الشرعي في الضغط على الطلاق بالموضوع الأول. كيف يتم عمل المحامي الشرعي في محاولة لقمع معدل الطلاق في المحكمة الشرعية سيلانجور ماليزيا ؟ ، الثاني ، ما هي العقوبات التي يواجهها المحامي الشرعي في محاولة لقمع معدلات الطلاق في المحكمة الشرعية سيلانجور ماليزيا؟

في هذا البحث ، كان نوع البحث الذي استخدمه الباحثون هو البحث التجريبي أو البحث الميداني. في البحث الذي أجرته هذه الباحثة ، كانت البيانات المستخدمة هي نتائج المقابلات والوثائق التي أجريت في مكتب غوامان آسري وشركة. كومباك ، سيلانجور ، ماليزيا.

نتائج هذا البحث هي على النحو التالي. الأول ، عمل ودور أحد المحامي الشرعي في الجهود المبذولة لقمع الطلاق في محكمة سيلانجور الشرعية هو التوفيق بين موكله مع نصح الأسرة إلى الوسيط في القضية ، وتقديم المشورة لعميله لإيجاد نقطة مساواة للطلاق لا تحدث. بالإضافة إلى ذلك ، التعاون مع الوكالات الحكومية لإجراء برنامج معلومات حول واجبات ومسؤوليات الزوج والزوجة ، وتقديم المشورة للعملاء للحفاظ على التواصل الجيد بين الأزواج. بعد ذلك ، شرح حقوق والتزامات الزوج والزوجة من خلال نصح المنظمة الموجود في المجتمع. الثاني ، العقوبات التي يواجهها المحامي الشرعي هي نقص التمويل من الجهات الحكومية لتنفيذ برنامج إعلامي خاص على حقوق والتزامات الأزواج في كثير من الأحيان ، ولا يتزع الخلاف بين الزوجين وعادات الزبون إلى النصيحة المعطاة إلا يريد العدالة التي تفيده. بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد تعاون جيد من الأسرة للمساعدة في تجنب الطلاق وبين الزوجين الحفاظ على التواصل الجيد.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, istilah peguam syarie¹ cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna peguam syarie dalam berbagai *literature* melalui risert dan studi akademik. Istilah peguam syarie di Malaysia ialah peguam yang dikenali juga dengan istilah peguam bela dan peguamcara.² Pengertian peguam syarie ialah orang Islam yang

¹ Peguam Syari'e adalah istilah yang digunakan Di Malaysia sama artinya dengan advokat di Indonesia.

²Zulkifli dan Hamid Murad, *Amalan Kehakiman Dan Guaman Syarie Di Malaysia* (Bangi: kolej Universiti Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, 2007), 91.

mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang hukum syarak, menjadi peguam syarie bagi mewakili pihak-pihak dalam apa-apa prosidang di dalam Mahkamah Syariah.³

Di Malaysia, setiap peguam syarie terikat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara, pemerintah negeri, dan majlis hakim-hakim Malaysia (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia). Selain itu, seorang peguam syarie berbeza-beda etika yang diatur setiap negeri-negeri bagian di Malaysia.⁴

Keberadaan peguam untuk mewakili tergugat atau penggugat dalam persidangan sering kali dipertikaikan berkaitan etika membela kliennya. Hal ini seperti diterbitkan dalam koran utusan online, yang mana menuntut seorang peguam syarie harus mempunyai kesedaran tinggi ketika menjalankan tugas dan menjaga etika-etika peguam syarie yang sudah di atur dalam Undang-undang⁵. Selain itu, meningkatnya kasus perceraian berdasarkan terbitan koran utusan online, ini menyebabkan peran secara tidak langsung oleh para peguam syarie dipersoalkan bukan karena tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus akan tetapi

³Warta Kerajaan Selangor 24hb Julai 2003 Bahagian V, Fasal 80, 49.

⁴Tajul aris dan Hisham Kamal, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2005), 167.

⁵ Shahiza Abdullah, "Peguam Syarie Jangan Langgar Etika", <http://www.utusan.com.my/berita/wilayah/pahang/peguam-syarie-jangan-langgar-etika-1.477540>, Diakses tanggal 20 November 2018.

lebih kepada etika dan menegakkan keadilan Islam yang mana seharusnya membantu untuk mengurangkan kadar perceraian terus meningkat.⁶

Seperti kita tahu bahwa peguam syarie ada dikarenakan untuk membela nasib dan keadilan seseorang kliennya agar tidak kalah dalam kasus yang dipertikaikan. Akan tetapi, nilai seorang peguam syarie disisi Islam dapat dilihat apabila ia lebih menegakkan keadilan yang sebenarnya bukan hanya keadilan kliennya. Ini sesuai dengan keadilan ketika mewakili dalam surah An Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا^۷

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepada mu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.⁸

Selain itu, dalam Arahan amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia tahun 2002, nomor tiga peguam syarie hendaklah mempunyai akhlak, sikap dan tingkah

⁶ Sheila Rani, “Isu Remeh Punca Perceraian”, <http://www.utusan.com.my/berita/nasional/isu-remeh-punca-perceraian-1.786878>, Diakses tanggal 21 November 2018.

⁷ QS An-Nisa', 4:105.

⁸ Andi Subarkah, terjemahan Al-Qur'an, (Jawa Barat: Syaamil Quran, 2010), 95

laku yang mulia, dan dalam melaksanakan tugas dan peranannya hendaklah bersifat amanah, jujur dan berniat baik untuk menegakkan keadilan⁹.

Namun begitu, terdapat sebahagian peguam syarie yang lebih memilih untuk menegakkan keadilan kliennya daripada keadilan Islam. Hal ini terjadi berkemungkinan karena faktor kebutuhan nafsu atau imbalan yang akan diterima oleh mereka jika memenangi sebuah kasus.

Dalam ruang lingkup Mahkamah Syariah, Peguam Syarie merupakan individu yang penting untuk membantu seseorang dalam menanggapi kasus yang ada sehingga mereka juga harus tetap menjaga etika dan undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti kita tahu secara umumnya Peguam Syarie hanya membantu kliennya akan tetapi Peguam Syarie juga harus memastikan prosiding di Mahkamah tidak melanggar dengan hukum syarak. Selain itu, seorang peguam Syarie juga harus tidak terikat dengan kehendak kliennya saja akan tetapi lebih kepada keadilan yang benar didalam undang-undang dan agama. Namun begitu, sekarang ada beberapa Peguam Syarie yang lebih memilih kehendak kliennya untuk menang sesuatu kasus bukan menjaga nilai keadilan undang-undang dan Peguam Syarie juga perlu memainkan peranan setiap kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah

⁹Ghazali, *Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Tahun 2002* (Putrajaya: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2002), 5.

Selangor agar usaha-usaha untuk menekan angka perceraian di negeri Selangor tidak meningkat dari tahun ketahun.¹⁰

Di Mahkamah Syariah Selangor angka perceraian terlalu tinggi berbanding dengan negeri-negeri bagian lainnya, data kasus perceraian seperti berikut:¹¹

Tabel I
Statistik Kasus Perceraian Tahun 2015-2017 Di Selangor

NO	JENIS DAN KOD KASUS	TAHUN			JUMLAH
		2015	2016	2017	
1.	014 – Tuntutan Fasakh	2, 131	2, 071	1, 532	5, 734
2.	054 – Tuntutan Pengesahan Lafazd Cerai	5, 173	4, 560	4, 108	13, 841
3.	055 – Tuntutan Perceraian	5, 955	6, 175	6, 226	18, 356
4.	056 – Tuntutan Khuluk/Tebus Talaq	41	37	25	103
5.	057 – Tuntutan Pengesahan Cerai Taklik	309	231	140	680
Jumlah		13, 609	13, 074	12, 031	38, 714

Sumber: Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (JAIS), 11 April 2018.

Data statistik tabel I bisa dijadikan bahan atau bukti yang menunjukkan bahwa kasus perceraian di Selangor begitu tinggi dari berbagai tuntutan yang ada. Adapun tuntutan-tuntutan penyebab Perceraian di Selangor ialah tuntutan fasakh,

¹⁰ Zulqarnain, *wawancara* (Gombak, 13 Mei 2018)

¹¹ Mariam Majid & Syafirul, e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, *Perceraian Rumah Tangga Di Negeri Selangor Darul Ehsan Dan Pendekatan Menanganinya*, Jurnal, (Selangor:Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, 2017).

tuntutan pengesahan lafaz cerai, tuntutan penceraian, tuntutan khuluk/ tebus talaq dan tuntutan pengesahan cerai taklik.

Walaupun jumlah total kasus penceraian tahun 2015 hingga 2017 menurun 11 persen dari 13.609 menjadi 12.031 namun khusus untuk tuntutan penceraian meningkat 4.5 persen dari 5.955 menjadi 6.226 sehingga angka tersebut bisa dikatakan tinggi berbanding negeri-negeri bagian yang lain. Ini menjadikan para Peguam Syarie di Selangor harus memainkan peran yang sangat teratur agar kasus penceraian di Negeri Selangor tidak menjadi yang tertinggi di Malaysia.

Hal ini menyebabkan setiap peguam syarie harus memikirkan cara untuk lebih efektif agar kadar angka penceraian ini menurun dari masa ke semasa. Dengan wujudnya beberapa organisasi peguam syarie yaitu Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) pada tahun 2001, Persatuan Peguam Syarie Selangor (PGSS), Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPMM), dan Badan Peguam Malaysia atau Majlis Peguam Malaysia. Hal ini banyak membantu para peguam agar lebih menjaga keadilan dan hak Islam sehingga tidak terikat atau terkawal hanya dengan kehendak kliennya.¹²

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai usaha yang dilakukan para peguam syarie yaitu peran peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian studi pada Mahkamah Syariah Selangor. Baik dari usaha yang dilakukan secara individu atau organisasi peguam syarie.

¹²Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), http://peguamsyarieMalaysia.blogspot.my/p/pimpinan-pgsm_28.html?m=1, Diakses tanggal 19 januari 2018.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tindakan peguam syarie dalam upaya menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia?
2. Apakah kendala yang dihadapi peguam syarie dalam upaya menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Dapat disimpulkan dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tindakan peguam syarie dalam upaya menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia.
2. Memahami kendala yang dihadapi peguam syarie dalam upaya menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsyah*, terutamanya dalam bidang peran seorang peguam syarie.

- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana secara teori terhadap pembentukan dan peran ahli hukum.

2. Secara Praktis:

- a. Memperdalam pengetahuan tentang dunia hukum sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang peran peguam syarie dalam dunia masyarakat.
- b. Membangunkan cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Falkutas Syariah untuk terus melakukan penelitian terhadap hal baru dalam cakupan Hukum Keluarga Islam serta mempraktikkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah.
- c. Memotivasikan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk para peguam syarie dalam usaha menekan angka perceraian.

E. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara jelas tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Peguam Syarie bermaksud kuasa hukum yang mempunyai kuasa di Mahkamah Syariah di Malaysia.

2. Mahkamah Syariah bermaksud tempat membicarakan dan mengadili hal-hal yang bersangkutan dengan hukum Islam di kalangan umat Islam, sebuah lembaga peradilan di Malaysia.
3. Selangor adalah negeri dengan jumlah penduduk terbanyak di Malaysia dan juga merupakan negeri terkaya antara semua negeri. Selain itu, Selangor merdeka dan telah tercantum sebagai sebuah negeri di antara 14 buah negeri di dalam negara Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957 yang mempunyai 9 Bagian (kecamatan). Pusat pemerintahannya adalah di Bagian Shah Alam, kota Dirajanya di Bagian Klang dan diperintah oleh Menteri Besar dan Sultan.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penelitian karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan daya guna penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti tetapi untuk para pembaca dan mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya. Kemudian definisi operasional yang menjelaskan kata perkata dari judul yang menjadi kata kunci. Penelitian terdahulu yang berisi tentang literatur-literatur

atau pustaka yang pernah mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, selain itu penelitian terdahulu berfungsi menunjukkan keorisinalitasan penelitian untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan karya peneliti. Kemudian sistematika penelitian yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penelitian.

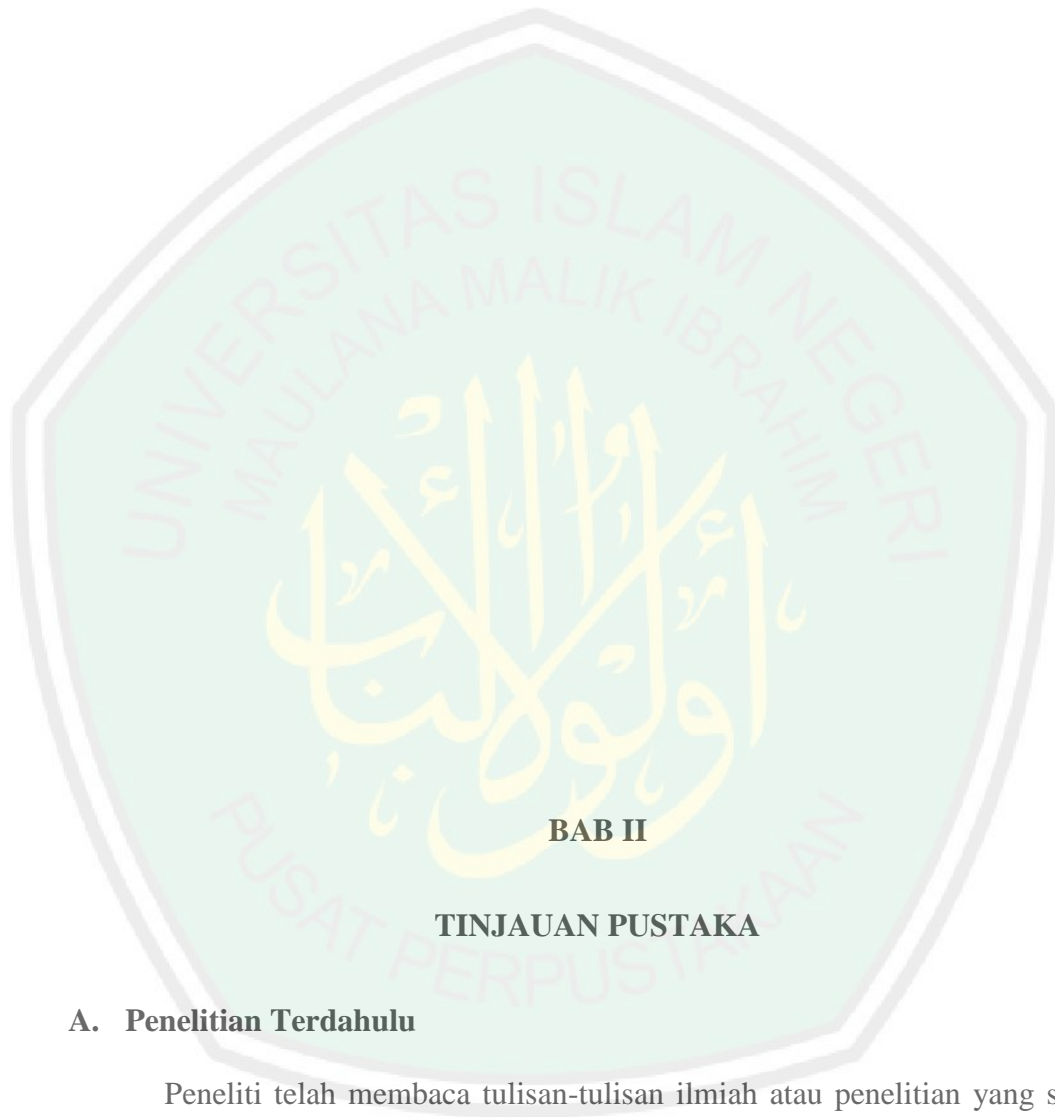
BAB II: Tinjauan Pustaka. dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori. Penelitian terdahulu dan kajian teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian dan menjawab rumusan masalah. Tema penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan peran advokat dalam upaya menekan angka perceraian.

BAB III: Metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagaimana rumusan masalah yaitu tindakan advokat dalam upaya menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor dan kendala apa saja yang dihadapi oleh advokat dalam usaha menekan angka perceraian.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.





A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang peran peguam syarie dalam berbagai kasus, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan yang penelitian ini adalah.¹³

1. *Peran Advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*, Ahmad Fathoni, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang seorang avokat untuk menyelesaikan sengketa perceraian di luar Peradilan Tulungagung. Fokus penelitian yang tulis oleh Ahmad Fathoni adalah meneliti akibat hukum bagi seorang advokat yang menyalah gunakan kuasa dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Selain itu, ia juga membahas tentang peran seorang advokat dalam membantu menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Paradilan Agama.¹⁴ Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang peran advokat agar kasus perceraian yang terjadi dapat dikurangi dengan berbagai cara dan usaha oleh advokat.
2. *Peranan Peguam Syarie dalam mengendali kes murtad dalam kalangan mualaf*, sebuah penelitian yang ditulis oleh Ain Mawaddah, Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Undang-undang Universiti Malaya Kuala Lumpur pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang peranan peguam syarie menanggapi kasus murtad yang terjadi dikalangan mualaf di Selangor. Fokus penelitian yang ditulis oleh Ain Mawaddah adalah pada peran-peran peguam syarie dalam menyelesaikan kasus murtad yang terjadi. Selain itu, penelitian

¹³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penelitian Karya ilmiah* (Malang: Falkutas Syariah UIN, 2015), 13.

¹⁴ Ahmad Fathoni, *Peran Advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: Institusi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015).

ini juga cuba mengaitkan peran advokat yang telah diatur dalam undang-undang agar kasus murtad yang terjadi dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti menyampaikan dakwah pada golongan mualaf, *maqasid syariah*, dan undang-undang. Ia juga menerangkan peran peguam syarie secara umum dalam hal-hal untuk membantu Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan sesuatu kasus yang terjadi terutamanya kasus murtad.¹⁵ Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan peran yang cuba dilakukan oleh peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian dan kendala yang dihadapi oleh para peguam syarie dalam usaha ini.

3. *Advokat Syariah Dalam mediasi perkara perceraian menurut Maqasid AL Syariah*, Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pemekasan pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang peran badan organisasi advokat untuk membantu advokat agar melakukan mediasi perkara perceraian supaya sengketa antara dua pihak tidak berlanjutan setelah perceraian. Selain itu, fokus penelitian yang di tulis oleh Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah adalah meneliti peran advokat untuk melakukan mediasi dalam kasus perceraian, peran advokat untuk melakukan mediasi menurut *maqasid syariah* dan beberapa usaha yang dilakukan oleh badan organisasi advokat

¹⁵ Ain Mawaddah, *Peranan Peguam Syarie Dalam Mengendalikan Kes Murtad Dalam Kalangan Mualaf*, Skripsi, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015).

untuk mengurangi sengketa selepas perceraian.¹⁶ Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang peran advokat secara menyeluruh tidak hanya pada mediasi dan tidak membahas mengenai sengketa selepas perceraian tetapi lebih kepada usaha agar tidak terjadinya perceraian.

4. *Tinjauan Yuridis Terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Febri Handayani, dosen Falkutas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang peranan advokat ketika mendampingi klien menurut tinjauan yuridis. Fokus penelitian yang tulis oleh Febri Handayani adalah meneliti peran seorang advokat untuk masyarakat terutamanya ketika terjadinya kasus sama ada di luar Peradilan atau di dalam Peradilan dan meneliti prinsip-prinsip advokat ketika melaksanakan tugasnya.¹⁷ Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis hambatan terhadap usaha yang dilakukan oleh advokat agar kasus perceraian yang terjadi dapat ditekan jumlah perceraianya.

¹⁶ Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, "Ulul Albab Volume 18 No 1", *Advokat Syariah Dalam mediasi perkara perceraian menurut Maqasid AL Syariah*, Jurnal, (Pemeriksaan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pemekasan, 2017).

¹⁷ Febri Handayani, "Hukum Islam Vol XV No. 1", *Tinjauan Yuridis Terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Jurnal, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

Tabel II
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fathoni, <i>Peran Advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung</i> , 2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada kuasa hukum di peradilan. 2. Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada bagaimana akibat hukum penyalahgunaan etika profesi advokat. 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek penelitian.
2.	Ain Mawaddah, <i>Peranan Peguam Syarie dalam mengendali kes murtad dalam kalangan mualaf</i> , 2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada peguam syarie. 2. Peran peguam syarie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada justifikasi perwakilan dan peranan peguam syarie dalam kasus murtad. 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek penelitian.
3.	Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, <i>Ulul Albab Volume 18 No 1, Advokat Syariah Dalam mediasi perkara perceraian menurut Maqasid AL Syariah</i> , 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada kuasa hukum di peradilan. 2. Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian bagaimana peran advokat dalam melakukan mediasi. 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek penelitian.
4.	Febri Handayani, <i>Hukum Islam Vol XV No. 1., Tinjauan Yuridis</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada kuasa hukum di peradilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian bagaimana

<p><i>Terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru</i> Jurnal, 2015.</p>	<p>2. Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa</p>	<p>peran advokat dalam mewakili kliennya. 2. Lokasi penelitian. 3. Subjek penelitian.</p>
--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Sejarah dan Undang-Undang Peguam Syarie

a. Sejarah Peguam Syarie

Secara umumnya peguam di Malaysia boleh dibagikan kepada dua kategori yaitu Peguambela dan Peguamcara, dan Peguam Syarie. Peguam syarie pula terbagi kepada dua kategori yaitu Peguam Syarie yang bukan Peguambela dan Peguamcara, dan Peguam Syarie yang juga Peguambela dan Peguamcara.¹⁸

Peguambela dan Peguamcara di Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Profesion Undang-Undang 1976 (Akta 166). Manakala di Sabah mereka juga tertakluk kepada Ordinan Peguambela Sabah dan di Sarawak tertakluk kepada Ordinan Peguambela Sarawak. Manakala Peguam Syarie tertakluk kepada Akta atau Enakmen Pentadbiran Agama Islam negeri-negeri dan juga tertakluk kepada kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan Peguam Syarie negeri-negeri. Bagi Peguam Syarie yang juga Peguambela dan Peguamcara, mereka bukan

¹⁸ Musa awang, "Peguam Syarie Di Malaysia", *Realiti Semasa & Prospek Ke Arah Penggubalan Akta Profesion Guaman Syarie*, Jurnal, (Selangor: Persatuan Peguam Syariah Malaysia (PGSM), 2017), 5.

sahaja tertakluk di bawah Akta atau Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri dan peraturan kecil Peguam Syarie, pada masa sama juga tertakluk di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 (Akta 166).

Dalam undang-undang Islam di Tanah Melayu sebelum Merdeka, telah terdapat peruntukan untuk membenarkan kehadiran peguam di Mahkamah Syariah. Dalam *Enactment No. 3 Of 1952, Administration Of Muslim Law Enactment, Selangor 1952* , yaitu antara undang-undang pentadbiran agama Islam terawal di Tanah Melayu, terdapat peruntukan untuk membenarkan kehadiran Peguambela dan Peguamcara bagi mewakili pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Syariah. Seksyen 50 *Enactment No. 3 Of 1952, Administration Of Muslim Law Enactment (Selangor), 1952* yang masih dalam versi Bahasa Inggeris, berbunyi seperti berikut

Section 50. Advocates and Solicitors.

(1) Notwithstanding anything contained in any written law, no advocate and solicitor shall have the right to appear in any Court on behalf of a party to any proceedings if such appearance would be contrary to the provisions of Muslim law.

(2) Any advocate and solicitor so appearing shall plead in the language of the Court or through an interpreter provided by him and approved by the Court.

Selepas Merdeka, peruntukan yang merujuk khusus kepada “Peguam Shari’ah”¹⁹ dapat dilihat dalam undang-undang Islam di Tanah Melayu. Sebagai contoh, Seksyen 51 Enakmen Pentadbiran Uagama Islam (Perak) 1965 (Enakmen No. 11 Tahun 1965) yang membenarkan peguam Shari’ah hadir mewakili mana-mana pihak dalam perbicaraan di mahkamah. Seksyen tersebut berbunyi:

¹⁹ Istilah Peguam Shari’ah digunakan pada awal Malaysia mardeka.

(1) Peguam Shar'iah boleh-lah mengambil bahagian dalam mana2 Mahkamah bagi satu pihak dalam perbicharaan.

(2) Majlis hendak-lah menyediakan daftar nama pada tiap2 tahun bagi orang2 yang di-dapati layak dan berkemahiran dalam hukum Shara' supaya boleh menjadi pembela dalam Mahkamah yang ditubuhkan di-bawah Undang-undang ini. Orang-orang itu akan di-kenali sa-bagai Peguam Shar'iah.

(3) Peguam Shar'iah tidak boleh hadir dalam mana2 Mahkamah bagi mana2 pihak dalam satu2 perbicharaan melainkan dengan lesen bertulis yang di-keluarkan oleh Majlis dengan menjelaskan bayaran yang di-tetapkan. Lesen yang demikian hendak-lah di-keluarkan tiap2 tahun dan ditanda tangani oleh Yang di-Pertua.

Apabila Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-negeri ditambahbaik sejak awal 1980-an, peruntukan tentang kehadiran Peguam Syarie dalam prosidang di Mahkamah Syariah telah juga ditambahbaik dalam undang-undang tersebut, sama waktu dengan penubuhan Mahkamah Syariah negeri. Peguam Syarie dibenarkan hadir dalam kasus di Mahkamah Syariah, untuk mewakili pihak plaintif atau defendan dalam kasus mal, atau tertuduh dalam kes jenayah syariah.²⁰

²⁰ Musa awang, *Realiti Semasa & Prospek Ke Arah Penggubalan Akta Profesion Guaman Syarie*, 6.

b. Undang-undang Peguam Syarie

Peruntukan berhubung Peguam Syarie terdapat dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri atau Enakmen Mahkamah Syariah Negeri, sebagaimana berikut:²¹

Tabel III

Senarai Enakmen/Ordinan/Akta Berhubung Peruntukan Peguam Syarie Mengikut Negeri.

Negeri	Peruntukan	Enakmen/Akta
Johor	Seksyen 80	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor) 2003.
Kedah	Seksyen 46	Enakmen Mahkamah Syariah (Kedah) 2008.
Kelantan	Seksyen 18	Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Kelantan) 1982.
Melaka	Seksyen 68	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Melaka) 2002.
N.Sembilan	Seksyen 80	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003.
Pahang	Seksyen 66	Enakmen Undang-Undang Islam (Pahang) 1991.
Perak	Seksyen 69	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (Pindaan 2009).
P.Pinang	Seksyen 80	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pulau Pinang) 2004.
Perlis	Seksyen 80	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perlis) 2006.
Sabah	Seksyen 32	Enakmen Mahkamah Syariah (Sabah) 2004.

²¹ Musa awang, *Realiti Semasa & Prospek Ke Arah Penggubalan Akta Profesion Guaman Syarie*, 7-9.

Selangor	Seksyen 80	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003.
Sarawak	Seksyen 28	Ordinan Mahkamah Syariah (Sarawak) 2001.
Terengganu	Seksyen 57	Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 2001.
Wilayah Persekutuan	Seksyen 59	Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993.

Sumber: Enakmen/Ordinan/Akta yang sedang berkuatkuasa.

Kemudian, berdasarkan enakmen tersebut, suatu undang-undang berhubung Peguam Syarie telah diperkenalkan di setiap negeri-negeri bagian di Malaysia, kecuali Sabah. Negeri bagian Perak merupakan negeri terawal yang mewujudkan undang-undang untuk Peguam Syarie, yaitu dinamakan Kaedah-kaedah Peguam Syariah (Perak) 1980, Johor (1082), Terengganu (1987) dan negeri-negeri bagian yang lain.²²

Senarai undang-undang Peguam Syarie yang terawal mengikut tahun diterbitkan adalah sebagai berikut:

- a. Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Perak), 1980.
- b. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Johor), 1982.
- c. Kaedah-Kaedah Peguam Syar'i (Terengganu), 1987.
- d. Peraturan-Peraturan Peguam Syarie (Kedah), 1988.

²² Musa awang, *Realiti Semasa & Prospek Ke Arah Penggubalan Akta Profesion Guaman Syarie*, 7.

- e. Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Kelantan), 1988.
- f. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Melaka), 1989.
- g. Peraturan-Peraturan Peguam Syariah (Pahang) 1990.
- h. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Selangor), 1991.
- i. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Sarawak), 1992.
- j. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Wilayah Persekutuan), 1993.
- k. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Perlis), 1995.
- l. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Pulau Pinang), 1997.
- m. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Sembilan), 2011.

Tabel IV

Senarai Terkini Kaedah/Peraturan Peguam Syarie Mengikut Negeri.

Negeri	Peruntukan
Johor	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Negeri Johor), 2005.
Kedah	Peraturan-Peraturan Peguam Syarie (Kedah darul Aman), 2016 ²³
Kelantan	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Kelantan), 2000. ²⁴
Melaka	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Melaka), 1989
N.Sembilan	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Negeri Sembilan), 2012. ²⁵
Pahang	Peraturan-Peraturan Peguam Syarie (Pahang), 1995. ²⁶
Perak	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Perak), 2003. ²⁷ (Pindaan 2015)

²³ Mengantikan Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Kedah) 1988.

²⁴ Mengantikan Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Kelantan), 1988

²⁵ Mengantikan Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Sembilan), 2011.

²⁶ Mengantikan Peraturan-Peraturan Peguam Syariah (Pahang), 1990.

²⁷ Mengantikan Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Perak), 1980.

P.Pinang	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Negeri Pulau Pinang), 1997.
Perlis	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Perlis), 1995
Sabah	Tiada
Selangor	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Selangor), 2008. ²⁸
Sarawak	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Sarawak), 1992.
Terengganu	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Terengganu), 2015.
Wilayah Persekutuan	Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1993.

Sumber: Enakmen-enakmen dan kaedah-kaedah yang sedang berkuatkuasa.

Selain dari Undang-Undang terkait Peguam Syarie diatas terdapat negeri bagian yang mengatur Undang-Undang Peguam Syarie didalam Enakmen/Ordinan Mahkamah Syariah seperti negeri Kelantan (Enakmen), Sabah (Ordinan) dan Sarawak (Ordinan).

2. Pengertian Peguam Syarie

Dalam perundangan Islam, konsep Peguam Syarie ini dikenali sebagai *al-wakalah bi al-khusumah*.²⁹ Perkataan *wakalah* ini berasal daripada perkata Arab yang berarti menjaga, menjamin, melengkap dan menyerah.³⁰

Dalam *Kamus Dewan*, peguam dirujuk sebagai orang yang membela dalam perbicaraan seseorang.³¹ Manakalah peguam syarie dikhususkan kepada seseorang yang membela kliennya di Mahkamah Syariah dalam kasus yang mana Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa.

²⁸ Menggantikan Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Selangor), 1991.

²⁹ Tajul Aris, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, 168.

³⁰ Mahmud Saedon Awang Othman, *Institusi Pentadbiran Undang-Undang dan Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 118.

³¹ *Kamus Dewan Bahasa*, Edisi Baru, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 925.

Dalam Perlembagaan Malaysia Bahagian 1- Permulaan, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, peguam syarie ditafsirkan sebagai seseorang yang dilantik sebagai peguam syarie di bawah Seksyen 59 akta tersebut. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) di bahagian permulaan juga mentafsirkan peguam syarie dengan maksud yang sama seperti di Wilayah Persekutuan tetapi di bawah seksyen yang berlainan yaitu di bawah Seksyen 80.

3. Peranan Peguam Syarie

Peranan seorang peguam adalah untuk melaksanakan tanggungjawab mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan sama ada bagi pihak yang penggugat, pihak tergugat, pihak yang memohon tuntutan dan pihak yang dituntut. Peguam bagi pihak yang mengugat atau pihak yang memohon tuntutan bertanggungjawab mengemukakan dakwaan, yaitu membuat tuduhan dan tuntutan.³² Manakala, peguam bagi pihak orang yang tergugat atau pihak yang dituntut pula bertanggungjawab menafikan dakwaan dan tuntutan atau mengemukakan tuntutan balas/pembelaan jika ada.

Selain itu, peguam syarie hendaklah membantu Hakim di Mahkamah Syariah dengan cara menegakkan keadilan yang sebenarnya agar kasus-kasus yang disidangkan tidak terkendala.³³ Sebelum persidangan, seseorang peguam syarie hendaklah bertindak sebagai penasihat atau mediator kepada kliennya dari sudut hukum syarak, undang-undang yang berkuat kuasa dan tindakan

³² Tajul aris dan Hisham Kamal, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, 181.

³³ Tajul aris dan Hisham Kamal, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, 182.

yang boleh dilakukan oleh kliennya. Namun begitu, peguam syarie juga haruslah menjadi perunding bagi pihak kliennya dan dia hendaklah berusaha untuk menyelesaikan kasus rumah tangga dan perkara bersangkutan kasus tersebut dengan memberi pengetahuan dari segi hak dan kepentingan kliennya.³⁴

Ketika persidangan, seorang peguam mempunyai peranan membantu hakim dalam jalan penyelesaian sesuatu kasus, melaksanakan atau menjalankan persiapan awal sama ada dalam bentuk gugatan atau pembelaan. Peguam Syarie juga perlu menghadirkan diri dan membela pihak yang tidak berkemampuan dalam mahkamah dengan cara mengemukakan fakta yang jelas dan hujah yang baik dan berkesan serta menjelaskan peruntukan undang-undang yang berkaitan.³⁵

Selain itu, peguam syarie juga harus memastikan bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa dan memastikan putusan tersebut dipatuhi oleh kliennya di samping mengeluarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah semasa dan selepas persidangan. Seterunya, peguam syarie harus menjaga kliennya terutama hal berkaitan dengan nafkah, nafkah iddah, nafkah anak, muta'ah, penceraian atau sebagainya.³⁶

³⁴ Tajul aris dan Hisham Kamal, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, 182.

³⁵ Ahmad Ibrahim, *Al-Ahkam Jilid 5 Penghakiman dan Kepeguaman*, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1997), 37-38

³⁶ Tajul aris dan Hisham Kamal, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, 183.

Seorang peguam syarie harus berpegang kepada prinsip menjaga kliennya dari berbagai perkara dan menjaga martabat hukum syarak dalam menangani berbagai kasus. Ia juga haruslah memperlihatkan kesungguhan dalam mengendalikan kasusnya dan mengikuti segala prosedur di Mahkamah Syariah.

4. Etika Peguam Syarie

Setiap profesi sememangnya mempunyai etika dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Secara umum, peguam syarie mempunyai etika dalam dua bagian yang telah digariskan, yaitu etika yang terdapat pada prinsip-prinsip peguam Islam.³⁷ Dan etika dalam kaedah-kaedah peguam syarie negeri.

Menurut prinsip peguam Islam, peguam syarie hendaklah berakhlak mulia dan amanah berdasarkan ketetapan syarak. Berakhlak mulia adalah dengan menurut akhlak Rasulullah s.a.w sebagai contoh tauladan seperti berkata benar, berkepribadian mulia, melakukan kebajikan dan sebagainya. Ini karena segala perbuatan mereka dalam mahkamah akan dipersoalkan. Walaupun pada zahirnya mereka memenangkan perkara dalam sesuatu kasus, tetapi mereka akan mendapat kemurkaan Allah jika kemenangan itu hasil daripada penipuan atau penyalahgunaan fakta. Bersifat amanah juga penting dalam membantu mahkamah syarie menyelesaikan sesuatu kasus. Peguam syarie juga perlu amanah dalam melaksanakan urusan kliennya sehingga memuaskan hati mereka.³⁸

³⁷ Ahmad Ibrahim, *Etika Hakim dan Peguam*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1996), 33.

³⁸ Tajul aris dan Hisham Kamal, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, 168.

Peguam Syarie haruslah melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur seperti yang diamanahkan oleh kliennya. Pada dasarnya prinsip peguam Islam menghendak seseorang peguam yaang berkelakuan jujur dan ikhlas dalam semua urusan mereka.³⁹

Selain itu, seorang peguam tidak boleh menerima korupsi karena ini akan merusak nilai-nilai keadilan. Islam melarang korupsi kepada pemberi atau penerima yang mana kedua-duanya dikira melakukan kezaliman. Undang-undang berkenaan etika peguam syarie ini terdapat dalam kaedah-kaedah peguam syarie negeri-negeri bagian. Hal ini, tidak mengkhususkan kepada etika bagi seseorang peguam syarie tetapi hanya menggariskan panduan kepada badan peguam syarie untuk memberi sanksi kepada peguam syarie dalam melaksanakan tugasnya buat sementara waktu. Hal tentang tindakan tata tertib terdapat dalam Bahagian IV Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 2008 (Selangor). Di bawah ini Kaedah 17(2), dinyatakan perkara yang jika dilakukan oleh peguam syarie boleh dikenakan tindakan tata tertib yaitu:⁴⁰

- a. telah berkelakuan mengikut apa-apa cara yang bertentangan dengan Hukum Syarak;
- b. telah membuat apa-apa pernyataan awam sama ada secara lisan atau bertulis yang semunasabahnya boleh ditafsirkan sebagai menghina agama Islam atau Majlis;

³⁹ Jasri Jamal, "Pengamalan Peguam Syarie", *Amalan dan Cabaran Peguam Syarie di Malaysia pada Alaf Baru*, Jurnal, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000).

⁴⁰ Kaedah 17(1)(2), Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 2008 (Selangor)

- c. telah disabitkan oleh mana-mana Mahkamah di Malaysia atau di mana-mana negara lain atas apa-apa kesalahan jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis;
- d. telah dengan sengaja atau tanpa apa-apa sebab yang munasabah enggan menjalankan kewajipannya terhadap kliennya;
- e. telah melanggar tanggungjawabnya kepada Mahkamah yang termasuk apa-apa kegagalannya untuk mematuhi aku janji yang diberikannya kepada Mahkamah;
- f. telah melakukan dengan perbuatan atau perkataan atau dengan apa-apa cara yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menghina Mahkamah;
- g. mengenakan fie atau ks melampau mengikut semua hal keadaan, dalam ketiadaan apa-apa persetujuan bertulis, berhubung perkhidmatan profesional yang diberikan kepada kliennya;
- h. tidak jujur atau bertingkah laku secara fraud dalam melaksanakan tugasnya;
- i. telah menawarkan atau memberi atau bersetuju memberi suapan kepada mana-mana orang kerana telah mendapatkan pekerjaan bagi dirinya atau mana-mana Peguam Syarie lain dalam apa-apa urusan undang-undang;
- j. telah secara langsung atau secara tidak langsung mendapatkan atau cuba mendapatkan pekerjaan bagi dirinya atau bagi seseorang Peguam Syarie lain melalui atau dengan arahan seseorang yang kepadanya sesuatu saraan kerana mendapatkan pekerjaan itu telah diberi olehnya atau dipersetujui untuk diberi sedemikian;
- k. telah menerima pekerjaan dalam apa-apa urusan perundangan melalui seorang penarik langganan;

- l. membenarkan mana-mana orang yang bukan seorang Peguam Syarie mengusahakan atau menjalankan urusan perundangan atas namanya atau firmannya tanpa orang itu berada di bawah kawalannya;
- m. menjalankan dengan sendiri atau melalui mana-mana orang lain yang diguna khidmat olehnya apa-apa tred, perniagaan atau kerjaya yang pada pendapat Majlis adalah tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai Peguam Syarie;
- n. telah didapati bersalah oleh Lembaga Disiplin yang ditubuhkan di bawah subseksyen 93(1) Akta Profesion Undang-Undang 1976;
- o. telah diisytiharkan sebagai bangkrap dan belum dilepaskan; atau
- p. telah melanggar atau mungkir mematuhi mana-mana peruntukan Kaedah ini atau mana-mana undang-undang bertulis, jika pada pendapat Majlis pelanggaran atau kemungkinan itu memerlukan tindakan tatatertib.

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, setelah dipersetujui oleh ketua-ketua hakim syarie, telah pun mengeluarkan satu arahan amalan berkaitan etika peguam syarie yang dikenali sebagai Etika Peguam Syarie 2000,⁴¹ Arahan amalan dijadikan pegangan mulai 1 Jun 2002.

Namun begitu, seseorang peguam yang telah diamanahkan untuk membela orang yang tidak bersalah haruslah menjalankan tugas tersebut dengan jujur. Ini kerana, tugas mereka sebagai wakil untuk mempertahankan hak orang yang lemah tertalu penting. Agar dapat menjamin nama perundangan Islam supaya terus dipercayai dan disegani oleh segenap lapisan masyarakat⁴²

⁴¹ Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) No. 4 Tahun 2002.

⁴² Tajul aris, *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah*, 181.

5. Mediasi

a. Pengertian

Definisi Mediasi ialah satu proses dimana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bersengketa antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai. Ini berarti mediasi merupakan 'perundingan secara terpimpin' (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa oleh mediator.⁴³

Di Mahkamah Syariah Selangor telah mempratekkan mediasi dibawah Pegawai Sulh yang diperkenalkan di negeri Selangor pada tahun 2001. Kaedah ini pada asasnya memetingkan cara penyelesaian pertikaian melalui rundingan dan ia merupakan satu solusi kepada proses perbicaraan yang umumnya diketahui akan mengambil masa yang lama dan melibatkan biaya yang tinggi. Selain proses Sulh, Majlis Peguam juga turut membantu melancarkan proses perdamaian dengan menubuhkan Pusat Mediasi pada tahun 1999.⁴⁴

Antara sengketa yang termasuk dalam rundingan sulh ialah rundingcara atau keauseling rumahtangga, hakam dan jawatan kuasa pendamai. Majlis Sulh juga membenarkan pihak-pihak bersengketa menhadirkan diri atau di wakilkan peguam syarie. Terkait undang-undang yang mengatur terdapat dalam Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (*Sulh*) Selangor

⁴³ Siti Noraini, Pelaksanaan Sulh dan Keberkesanannya di Mahkamah Syariah Selangor, (Augustus, 2008), 2.

⁴⁴ Hammad Dahalan, Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh, (17 November, 2014), 563.

2001 diwartakan⁴⁵ pada 20 Desember 2001 dan mula berkuat kuasa 1 Augustus 2001.⁴⁶

Terdapat kasus tertentu sahaja yang menjadi bidangkuasa *Sulh* antaranya yaitu: ⁴⁷

- a)Tuntutan kerana melanggar janji untuk berkahwin / pertunangan
- b)Tuntutan-tuntutan berbangkit dari suatu perceraian seperti: - Muta'ah - Nafkah Iddah - Nafkah Tertunggak - Harta Sepencarian - Hutang Mas Kahwin - Hal-hal lain yang difikirkan munasabah
- c)Tuntutan Hak Jagaan Anak (Hadhanah) dengan melihat kepentingan anak-anak tersebut dalam tempoh perkahwinan mahupun selepas perceraian.
- d)Tuntutan Nafkah Anak
- e)Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah

b. Proses pelaksanaan Mediasi

Mediasi ialah suatu proses perundingan dipimpin, tertutup serta terjaga, informal dan sukarela untuk menyelesaikan persengketaan dengan dibantu oleh satu pihak ketiga yang *neutral* dan *non-pertisan*. Mediator juga bekerjasama dengan pihak bersengketa untuk mencari solusi secara damai dan

⁴⁵ Istilah diwartakan bermaksud dilaksanakan.

⁴⁶ Hammad Dahalan, Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh, 564.

⁴⁷ Hammad Dahalan, Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh, 566.

dipersetujui oleh kedua pihak tersebut. Prosedur Mediasi boleh digunakan dalam pelbagai konteks, terutamanya hubungan dan masalah kekeluargaan. Persatuan Peguam Muslim Malaysia (PPMM) berhasrat menubuhkan sebuah Pusat Mediasi Islam (PMI), yang bertujuan antara lainnya untuk memberi sokongan terhadap sistem kehakiman syariah yang tersedia serta alternatif kepada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan persengketaan mereka secara proses mediasi. Penubuhan pusat ini akan membantu menyelesaikan kasus tertanggung seperti kasus berkaitan nafkah, harta sepencarian dan hadanah atau perubahan perintah berkaitan ketiga-tiga kasus tersebut.⁴⁸

Proses mediasi merupakan alternatif yang baik bagi penyelesaian persengketaan dengan segera. Selain mediasi, arbitrase juga telah diperkenalkan sebagai alternatif penyelesaian persengketaan antara pihak. Di Malaysia, Akta Mediasi 2012 telah diluluskan bagi menjamin kelancaran proses mediasi. Proses mediasi mengikut prinsip syariah dikenali sebagai *al sulh* ataupun *al wisatoh* yang bererti majlis yang menamatkan persengketaan secara reda meredai.

c. Perbedaan Pegawai Sulh dan Mediator

Terdapat perbedaan secara umumnya antara peranan mediator dengan Pegawai Sulh. Pertama, objektif sulh antara lain ialah menempatkan kehendak agama sebagai perkara yang utama dalam penyelesaian sulh manakala dalam mediasi tidak meletakkan perkara agama sebagai salah satu syarat penyelesaian pertikaian. Ini kerana dalam mediasi perkara penting

⁴⁸ Hammad Dahalan, Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh, 566.

ialah mediator perlu memudahkan pihak bertikai untuk menyelesaikan pertikaian.

Kedua ialah proses kokus⁴⁹. Dalam mediasi perbincangan secara sebelah pihak tidak digalakkan manakala dalam Majlis Sulh, kokus adalah proses yang digalakkan kerana ia memudahkan Pegawai Sulh mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan banyak. Selain itu, ia juga berfungsi untuk Pegawai Sulh mencadangkan penyelesaian yang perlu setelah berjaya memahami konflik yang ada dengan baik. Maka, peranan Pegawai Sulh adalah untuk menggalakkan proses kokus supaya proses penyelesaian dapat dibuat dengan cepat, mudah dan berkesan. Selain itu, Pegawai Sulh juga menggalakkan perbincangan yang lebih bersifat kepada kepentingan pada masa hadapan dan bukannya berterusan membincangkan hal-hal yang sudah lalu sehingga tujuan pihak-pihak bersengketa ke proses *sulh* difokuskan mencari penyelesaian terhadap isu-isu penting.⁵⁰

⁴⁹ Istilah kokus bermaksud perbincangan hanya sebelah pihak bukan kedua-dua belah pihak sengketa.

⁵⁰ Hammad Dahalan, Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh, 567.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. Penelitian lapangan juga merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵¹

⁵¹ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, pengantara metode penelitian hukum (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2012), 133.

Dengan demikian peneliti turun lapangan secara langsung kepada peguam syarie di kantor Guaman Asri Musa & Co. Gombak, Selangor Malaysia yang berkenaan untuk diwawancarai, karena setelah peneliti menghadap kepada masing-masing peguan syarie, semua peguam syarie memberikan respon untuk diwawancarai. Dalam hal ini peneliti mengambil langsung sumber data dari kantor Guaman Asri Musa & Co. Gombak, perihal adanya kasus peran peguam syarie dalam menurunkan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum dan analisis dengan menggunakan kaedah-kaedah Peguam Syarie 2008. Pendekatan yang pertama dan kedua akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah.

Menurut lofland, sumber data utama penelitian kualitatif ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵² Penelitian ini kemudian akan menghasilkan penelitian deskripsif karena menyelidiki keadaan dilapangan secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang cukup sederhana, karena peneliti hanya mengamati apa-apa yang sudah ada tanpa melakukan perubahan, penambahan atau mengadakan manipulasi.⁵³ Terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara.

⁵²Lexy j. Maloeng, M.A, *Metodologi penelitian kualitatif*, (cet-31, bandung:remaja posdakarya, 2013), 157.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur suatu pendekatan praktik*, (jakarta: rieneka cipta, 2010), 3.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pejabat Guaman Asri Musa & Co. Gombak, Selangor, Malaysia. Lokasi ini merupakan bagian dari peneliti melakukan penelitian terkait peran Peguam Syarie dalam upaya menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor.

Pejabat Guaman Asri Musa & Co. Yang memiliki beberapa peguam syarie yang pengalamannya di seluruh Mahkamah Syariah Selangor, berbagai latar belakang pemikiran, akademik dan perkara yang mengkhususkan dalam hal peran peguam syarie untuk menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor.

Pengambilan tempat ini sebagai lokasi penelitian diantaranya ialah karena faktor yang peneliti angkat merupakan hal yang sedang terjadi di tempat tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data adalah asal data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan istilah sumber data karena merupakan penelitian empiris. Adapun sumber penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer, merupakan data pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁵⁴ Sumber data primer yang diambil adalah melalui wawancara kepada informan yaitu:

- a. Peguam Syarie:
 - 1) Tn. Zulkarnain
 - 2) Pn. Hazirah

⁵⁴ H. M. Burhan Bungis, *“Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”*, (Jakarta: Kencana, 2013), 120

- 3) Tn. Roshdan
- b. Klien:
 - 1) En. Imran
 - 2) Pn. Amalina

Sumber data sekunder atau sumber data kedua merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literatur-literatur tentang talak yaitu:

- a. Perpustakaan UIN Malang.
- b. Perpustakaan Kuala Lumpur Malaysia.
- c. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- d. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008.
- e. Arahan Amalan No.4 Tahun 2002 Etika Peguam Syarie

E. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dari fenomena yang di selidiki secara langsung terhadap obyeknya.⁵⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis guna memperoleh data dan keterangan dalam penelitian, dengan cara terjun langsung ke tempat yang dituju oleh peneliti guna untuk memperoleh kebenaran dari suatu tempat dan para peguam syarie yang diteliti. Kegiatan observasi tersebut tidak

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi terhadap yang terdengar dan didengar.

Berbagai ungkapan atau pertanyaan yang terlontar dalam sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi; observasinya melalui indera pendengaran.⁵⁶

b. Wawancara

Dalam mencapai tingkat pemahaman yang mendalam diperlukan cara penggalan data yang handal. Teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, teknik wawancara digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan.⁵⁷

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dan mendalam. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa peguam syarie untuk mendapat informan tentang peran seorang peguam syarie dalam upaya menekan angka perceraian antara pihak-pihak yang dimaksudkan:

⁵⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 66.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 67.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 135.

Tabel V**Pihak-pihak Peguam Syarie yang di wawancara**

No.	Nama	Masa Kerja	Pendidikan
1.	Tn. Zuqarnain	25 tahun	UIAM
2.	Pn. Hazirah	10 tahun	UITM
3.	Tn. Roshdan	20 tahun	USIM

Tabel VI**Pihak-pihak klien yang di wawancara**

No	Nama	Masa Kerja	Pendidikan
1.	En. Imran	-	SPM
2.	Pn. Amalina	-	SPM

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui teknik dokumen. Dokumen yang didapatkan oleh peneliti selama penelitian berupa dokumen atau file yang menjelaskan tentang peran Peguam Syarie di Malaysia.

F. Pengelolaan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan editing, verifikasi, klafikasi, menganalisa data, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Diantara tahap-tahap tersebut adalah:

a. Pemeriksaan Data (*Editting*)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan ataupun dari hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah satu masih meragukan⁵⁹. Data-data dan daftar pertanyaan diteliti kembali sebelum melakukan wawancara kepada advokat persatuan peguam Malaysia mengenai peran advokat menekan angka perceraian.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, kerna kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.⁶⁰ Artinya, setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁵⁹Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 406.

⁶⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantara Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 169.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.⁶¹

d. Analisis (*analysing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok dan kategori⁶². Analisis dilakukan dalam penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari data-data hasil klasifikasi dan menggunakan teori dan dalil-dalil lain sehingga diperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan ia sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁶³

⁶¹Nana Sudjana dan awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), 84.

⁶²Nazir, "*Metodologi*", 405.

⁶³Sudjana dan kusuma, *Proposal Penelitian*, 16.



BAB IV

PERAN DAN KENDALA PEGUAM SYARIE DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PENCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR

A. Paparan Data

1. Lokasi Penelitian

Mahkamah Syariah Selangor merupakan salah satu mahkamah yang ada diantara empat belas negeri di Malaysia. Selain itu, keistimewaan Mahkamah Syariah Selangor ialah merupakan sebuah Mahkamah Syariah yang berada disebuah negeri yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di seluruh negeri yang ada di Malaysia.

Dalam suasana kepadatan penduduk Mahkamah Syariah Selangor juga merupakan salah satu Mahkamah Syariah di Malaysia yang menangani kasus-kasus yang tinggi pertahun berbanding di negeri-negeri yang lain. Tidak hanya menangani kasus berkaitan nikah, cerai dan waris, tetapi ia juga menangani kasus hukum bisnis syariah atau dikenali sebagai bank muamalat.

Oleh karena itu, kasus perceraian juga tinggi di negeri Selangor yang terjadi sebagai contohnya tuntutan fasakh, tuntutan pengesahan lafadz cerai, tuntutan perceraian, tuntutan khuluk/tebus talaq dan tuntutan pengesahan cerai taklik. Dengan demikian, ada beberapa usaha atau peran yang ditekankan oleh para peguam syarie di Selangor agar jumlah perceraian dapat dikurangkan.

2. Kondisi Objektif Mahkamah Syariah Selangor

Gambar 1

Peta Mahkamah Syariah Selangor



3. Sejarah Singkat Penubuhan Mahkamah Syariah Selangor

Mahkamah Syariah Negeri Selangor ditubuhkan berdasarkan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Selangor(1952) Seksyen 44(1) dan 44(2). Sejak ditubuhkan hingga September, 1990, Mahkamah Syariah Negeri Selangor ditadbirkan bersama Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Mulai 1 September 1991, pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah telah dibedakan daripada pengurusan pentadbiran JAIS dan dikenali sebagai Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Pusat pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor bertempat di Tingkat 5 & 6, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.⁶⁴

Namun begitu, mulai 2 Oktober 2003, pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah diubah namanya dan dikenali sebagai Jabatan kehakiman Syariah Selangor (JAKESS). Bermula 18 Juli 2011, JAKESS telah berpindah dan memulakan operasinya di bangunan baru di Bangunan Mahkamag Syariah Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor. Selain itu, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) terdiri dripada Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan 11 Mahkamah Rendah

⁶⁴ Tim Penyusun, *Pelan Tindakan Inovasi JAKESS 2015-2020* (Selangor: JAKESS, 2015), 3.

Syariah.⁶⁵

Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam merupakan Mahkamah tertinggi diantara Mahkamah Syariah yang ada di Selangor yang mana terdapat juga Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bandaraya Shah Alam, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sabak Bernam, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Langat, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Selangor, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Gombak Timur, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Gombak Barat, dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Peguam Syarie Dalam Upaya Menekan Angka Penceraian Di Mahkamah Syariah Selangor

Di Mahkamah Syariah Selangor sudah menjadi kebiasaan setiap tahun jumlah kasus penceraian semakin meningkat berbanding dari negeri-negeri yang lain. Dimana hal ini bisa menyebabkan kekhawatiran terhadap para peguam syarie bukan hanya mewakili perkara penceraian tetapi memainkan peran untuk menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang peguam syarie itu sendiri ditugaskan untuk

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pelan Tindakan Inovasi JAKESS 2015-2020*, 3.

mewakillikan setiap perkara yang sudah ada di Mahkamah Syariah, akan tetapi seorang peguam syarie juga harus memainkan peran dalam berbagai perkara agar nilai keadilan yang benar menurut Islam tetap dijaga dengan ini etika kejujuran dan menghormati Mahkamah terlaksana seperti yang dijelaskan didalam Etika Peguam Syarie Tahun 2000.

Peguam Syarie juga terdapat berbagai organisasi yang mana ia menjaga disiplin dan akhlak seorang peguam syarie ketika didalam dan diluar Mahkamah Syariah. Peran peguam syarie amatlah penting ketika terjadi sesuatu kasus yang mana mereka perlu memainkan peran bukan hanya untuk menegakkan keadilan kliennya tetapi keadilan Islam juga.

Secara teori dan prinsip seorang peguam syarie memang seharusnya menyelesaikan kasus yang ditangani akan tetapi dalam pembahasan ini kita juga membahas peran yang dimiliki oleh para peguam syarie dimana peran ini digunakan untuk menekan angka penceraian yang ada di Mahkamah Syariah Selangor.

Bicara terkait peran peguam syarie, terdapat berbagai tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda antara peguam syarie yang ada di Mahkamah Syariah Selangor seperti peran peguam syarie dalam perkara menekan angka penceraian hanyalah sebagai alternatif yang dilakukan para peguam syarie, perkara yang harus dilakukan ketika seorang peguam syarie menanggapi sesuatu kasus dan usaha yang cuba diketengahkan oleh peguam syarie agar kasus penceraian semakin mengurang.

Peran-peran yang dilakukan oleh peguam syarie di Mahkamah Syariah Selangor antaranya menasihati kliennya dan suami/istrinya agar mencari titik persamaan dan perbezaan agar penceraian tidak terjadi, cuba mendamaikan antara pihak dengan pendekatan ahli keluarga mereka seperti ibubapanya, bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Selangor untuk melakukan program kepada masyarakat terkait dampak penceraian, menjelaskan hak-hak dan kewajiban seorang suami istri yang mana kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, peguam syarie mendekati masyarakat umum untuk menerangkan tentang pernikahan dan penceraian agar mereka faham, dan berbagai lagi yang akan dijelaskan selepas ini.

Berikut merupakan sebagian peran peguam syarie dalam menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor:

a. Membantu Klien Menyelesaikan Sengketa

Di bawah ini disertakan petikan wawancara tanggal 22 Februari 2018 dengan peguam syarie yang berpengalaman selama 25 tahun, tentang peran peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian.⁶⁶ Disampaikan oleh Tuan Zulqarnain bahwa:

Saye suruh dia senaraikan apa yang dia suke dan saye suruh dia bagi tahu suaminya untuk buat bende yang sama dan comparekan, dan notekan mana yang boleh mana yang tak boleh. Selepas itu saye draftkan satu perjanjian untuk diorang, sampai sekarang mereka masih suami isteri

Diterjemahkan oleh peneliti: ***Saya memerintahkan dia (istri) menyenaraikan perkara yang disukai dan saya memerintahkan dia (istri)***

⁶⁶ Zulqarnain, wawancara (Gombak, 22 Februari 2018)

memberi tahu suaminya untuk melakukan hal yang sama dan jadikan perbandingan antara keduanya, dan catat perkara apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan antara pasangan itu. Selepas itu, saya lakukan satu perjanjian bertulis untuk kedua-nya, sehingga sekarang mereka masih hubungan suami istri.

Kaidah Perundangan bidang kuasa dan tatacara Mahkamah Syariah telah menjelaskan bahwa peguam syarie harus melaksanakan tanggungjawab mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dan membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga peran yang diatur didalam perundangan dan pelaksanaan oleh peguam syarie itu sama yang mana secara tidak langsung peguam syarie bukan saja mewakili klien dalam prosidang tetapi juga membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah atau sengketa yang dihadapi oleh kliennya.

b. Sebagai Penasihat Klien

Sementara itu, menurut Puan Hazirah, yang diwawancarai pada tanggal 23 Februari 2018.⁶⁷ Selaku peguam syarie perempuan yang berpengalaman selama 10 tahun di Mahkamah Syariah Selangor mengatakan bahwa peran peguam syarie dalam upaya menekan angka perceraian harus melihat kondisi permasalahan antara suami dan istri, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Pada kes yang lain, ada suaminya jumpe saye. Bagi tahu yang isterinya marah dia dan nak failkan kes cerai. Dan saye tanye dia apa yang boleh kamu buat, dia kata dia akan bincanglah kes tu besok. Dia jumpa saye hari ni dan kes ya besok, jadi saya cakap bincang elok-elok dengan bini

⁶⁷ Hazirah, wawancara (Batu Caves, 23 Februari 2018)

awak malam nanti, dan besok pagi dia jumpa saya dan kate isteri dia tak jadi bercerai. Rupanya isterinya itu ada masalah sikit tentang perangai suaminya dan mereka berjaya mencari penyelesaian bersama setelah suaminya ikut kata saya untuk bincang masalah mereka berdua.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Pada kasus yang lain, ada suaminya ketemu saya. Memberitahu yang istrinya marah kepadanya dan menuntut tuntutan perceraian. Dan saya menanyakan apa perkara yang dia bisa lakukan, dia (suami) akan mengatakan kasus itu akan sidang besok. Dia (suami) berjumpa saya sehari sebelum sidang, jadi saya sarankan dia berkomunikasi dengan istrinya malam ini secara baik agar tidak terjadi perceraian, dan keesokan harinya dia berjumpa saya dan mengatakan istrinya menarik tuntutan perceraian. Tuntutan perceraian ini terjadi karena istrinya ada masalah dengan karakter suaminya dan mereka berjaya mencari solusi selepas suaminya mendengarkan saran saya untuk berkomunikasi dengan baik tentang masalah mereka.*

Selain itu, dalam kaidah perundangan dan tatacara Mahkamah Syariah menjelaskan yang mana seorang peguam syarie hendaklah bertindak sebagai penasihat atau mediator kepada kliennya dari sudut hukum syarak, dan undang-undang yang berkuat kuasa di negeri kliennya.

Seterusnya, etika peguam syarie Arahan Amalan No. 4 Tahun 2002 ayat 11 yang menjelaskan bahwa seorang peguam syarie hendaklah menjalankan pembelaan dengan cara yang saksama dan terhormat. Pembelaan yang saksama dan terhormat itu juga meliputi dalam hal memberi nasihat-nasihat yang baik dan benar agar keadilan disisi Islam tetap terjaga.

Selanjutnya, di ayat 5 menjelaskan bahwa peguam syarie tidak diwajibkan bertindak sebagai penasihat atau penguambela bagi tiap-tiap orang yang hendak menjadi klienya tetapi hendaklah sanggup menerima apa-apa arahan Mahkamah-mahkamah di mana harus menjalankan amalan dengan baik. Disini bisa difahami bahwa menjadi penasihat itu tidak diwajibkan sekiranya seorang peguam syarie tidak diberikan keizinan dari Mahkamah tentang sesuatu kasus bagi tiap-tiap orang.

c. Bekerjasama dengan Pihak Berkuasa

Dalam memandang peran peguam syarie di zaman yang modern ini, tidak hanya terikat dengan fungsi mereka semata-mata yang mana hanya membela klien-Nya tetapi harus melihat sentuasi kasus penceraian yang mereka tanggani yang mana ia berkemungkinan bisa didamaikan. Selain itu, peran peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian juga bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti yang dijelaskan sehingga hasilnya bisa saja berubah dari pasangan bercerai kepada terjalin semula keharmonian rumah tangga.

Namun begitu, peguam syarie juga harus bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dalam usaha menekan angka penceraian ini seperti dijelaskan oleh Tuan Roshdan, selaku peguam syarie yang berpengalaman selama 20 tahun di Mahkamah Syariah Selangor:⁶⁸

⁶⁸ Rohsdan, *wawancara* (Sri Rampai, 14 Mei 2018)

Bende yang patut dibuat peguam syarie dalam kes penceraian yang tinggi di Selangor ialah saya akan bekerjasama dengan Jais dan Mais untuk melakukan program penerangan. Program ini akan jelaskan skop cerai sehingga masyarakat akan paham kesan buruknya

Diterjemahkan oleh peneliti: *Perkara yang harus dilakukan peguam syarie dalam kasus penceraian yang tinggi di Selangor ialah saya akan bekerjasama dengan Jais dan Mais untuk melaksanakan program penjelasan. Program ini akan menjelaskan tentang penceraia sehingga masyarakat akan fahami dampaknya.*

Didalam etika peguam syarie Arahan Amalan No. 4 Tahun 2002 ayat 15 yang menjelaskan bahwa peguam syarie hendaklah mempertahankan kepentingan keadilan, klienya dan kehormatan profesinya. Sehingga dengan cara bekerjsamanya antara peguam syarie dan pemerintah nilai keadilan yang dituntut bisa terlaksana dan kadar penceraian bisa diturunkan.

d. Mendekati Organisasi Masyarakat

Seterusnya, peguam syarie bukan hanya melakukan perkara tersebut akan tetapi ia juga mendekati masyarakat seperti mengikuti berbagai organisasi masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga seperti penjelasan Puan Hazirah berikut.⁶⁹

Jadi kite (peguam syarie) akan mendekati masyarakat dengan join organisasi mereka untuk terangkan kepada dorang hak dan kewajipan sebagai isteri kerana menurut pengetahuan saya kebanyakan mereke tak tau atau tak mau tau apa hak-hak dan kewajipan sebagai isteri.

⁶⁹ Hazirah, wawancara (Batu Caves, 23 Februari 2018)

Diterjemahkan oleh peneliti: *Jadi kita akan mendekati masyarakat dengan masuk organisasi mereka untuk menerangkan kepada mereka tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri karena menurut pengetahuan saya kebanyakan mereka tidak tahu atau tidak mahu tahu apa hak-hak dan kewajiban sebagai istri.*

Walaupun, tidak diatur didalam etika peguam syarie Arahan amalan No. 4 Tahun 2002 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 tetapi menurut hasil wawancara peneliti kebiasaannya peguam syarie yang berusaha menekan angka pencerain terus meningkat seringkali mendekati dirinya dengan masyarakat dengan berbagai cara salah satunya dengan mengikuti organisasi yang ada di masyarakat. Ini penting terutamanya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi disesuatu masyarakat sehingga kasus punca pencerai ini bisa ditangani dengan kefahaman peguam syarie.

e. Bekerjasama dengan Berbagai Agensi Bukan Pemerintah

Seterusnya, seorang peguam harus memainkan peran bekerjasama dengan berbagai agensi dengan mengisi materi atau ilmu sebagai contoh program pra-perkahwinan dan pasca-perkahwinan yang ada di Malaysia.

Menurut Tuan Zulqarnain:⁷⁰

Seperti kite tau, always pasangan bercerai ikut program kursus pra-perkahwinan dan pasca-perkahwinan. Tapi still ada yang cerai, ini maybe kerana dorang tak di kasi ilmu cerai dan punca-punca cerai. Bende ni penting untuk masyarakat tau agar dorang dapat elakkan sebuah pencerai dalam rumah tangga. Dan peguam syarie harus bekerjasama dalam hal ini dengan agensi-agensi yang melakukan program pra-perkahwinan dan pasca-perkahwinan.

⁷⁰ Zulqarnain, wawancara (Gombak, 22 Februari 2018)

Diterjemahkan oleh peneliti: *Seperti kita tahu, setiap pasangan bercerai mengikuti program pra-perkahwinan dan pasca-perkahwinan. Tetapi masih ada penceraian yang terjadi, berkemungkinan karena mereka tidak di beri ilmu penceraian dan sebab-sebab penceraian. Hal ini penting untuk masyarakat tahu supaya mereka bisa menghindari penceraian dalam rumah tangga. Dan peguam syarie harus bekerjasama dalam perkara ini dengan organisasi-organisasi yang melaksanakan program pra-perkahwinan dan pasca-perkahwinan.*

Peneliti tidak menemukan aturan yang mengatur tentang kerjasama dengan berbagai agensi bukn pemerintah didalam etika peguam syarie Arahan amalan No. 4 Tahun 2002 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Namun begitu, hal ini menarik dikarenakan dengan kerjasama antara peguam syarie dan agensi bukan pemerintah bisa membuat acara terkait penerangan terkait penceraian sebagai contoh melakukan acara tentang penerangan hak dan kewajiban seorang suami dan istri didalam rumah tangga sehingga masyarakat akan lebih memahami akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri.

f. Memanfaatkan Ahli Keluarga Klien

Justeru itu, peguam syarie haruslah memanfaatkan ahli keluarga sang pasangan untuk dijadikan orang tengah antara suami istri tersebut menurut Tuan Roshdan:⁷¹

Saye biasanye berjaya dalam beberape kes yang tak jadi cerai. Kadang-kadang saye cube gunekan orang tengah dalam ahli keluarga suami atau

⁷¹ Roshdan, wawancara (Sri Rampai, 14 Mei 2018)

isteri. Namun saye tak hanya melepaskan tanggungjawab tapi saye juga mainkan idea-idea untuk mereka kembali dengan menggunakan orang tengah itu sebagai perantaraan percakapan saye.

Dijermahkan oleh peneliti: *Saya biasanya berhasil dalam beberapa kasus yang tidak jadi bercerai. Kebiasaannya saya cuba menggunakan **orang tengah** dalam ahli keluarga pasangan tersebut. Namun saya tidak hanya melepaskan tanggungjawab itu, tetapi saya juga memberi kata-kata untuk mereka kembali bersama dengan menggunakan orang tengah sebagai perantaraan kata-kata tersebut.*

Penjelasan diatas sama dengan peranan yang dijelaskan di teori yang mana peguam syarie haruslah menjadi perunding bagi kliennya dan berusaha untuk menyelesaikan kaus rumah tangga berdasarkan pegetahuan dari segi hak dan kepentingan kliennya.

Dalam undang-undang yang diatur di etika peguam syarie Arahan amalan No. 4 Tahun 2002 ayat 3 menjelaskan penguam syarie hendaklah mempunyai akhlak, sikap dan tingkah laku yang mulia, dan dalam melaksanakan tugas dan peranannya hendaklah bersifat amanah, jujur dan bernit baik untuk menegakkan keadilan. Berdasarkan ayat 3 tersebut peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa keadilan juga bisa terwujud dengan memainkan peran ahli keluarga untuk klienya yang bersengketa tidak bercerai karena dengan memanfaatkan keluarga berkemungkinan besar penceraian tersebut tidak akan berlaku.

g. Memberikan Saran dan Pandangan

Selain itu, menurut saudara Imran yang pernah berhasil tidak menceraikan istri memberi pandangan bahwa setiap saran dan kata-kata peguam syarie memberi kesan yang mendalam kepada beliau sehingga penceraian tidak terjadi. Dengan memberi beberapa cara sebagai solusi sengkata yang dia hadapi bersama istrinya.⁷²

Dari pembahasan diatas jelas bahwa telah banyak usaha dan peran yang dilakukan oleh para Peguam Syarie sehingga hasil dari usaha-usaha tersebut berjaya menurunkan angka kasus penceraian tahun 2015 sehingga 2017 yang mana jumlah pada tahun 2015 sebanyak 13.609 dan tahun 2017 sebanyak 12.031. penurunan ini harus diteruskan dengan usaha dan peran oleh peguam syarie agar angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor terus menurun dari tahun ketahun.

Didalam etika peguam syarie Arahan amalan No. 4 Tahun 2002 ayat 13 menjelaskan bahwa peguam syarie tidak boleh menjalankan sesuatu atau membuat pembelaan yang mana bertujuan untuk melambatkan proses persidangan atau membebankan atau memudaratkan pihak lawannya. Dari penjelasan ayat 13 bisa difahami bahwa dengan memberi saran dan pandangan yang baik kepada klienya bisa menghasilkan keputusan yang baik dan mempercepat proses persidangan. Sehingga tidak berlakunya pelanggaran etika seorang peguam syarie yang telah di atur oleh Mahkamah Syariah.

⁷² Imran, *wawancara* (Sentul, 27 Juli 2018).

2. Kendala Peguam Syarie Dalam Upaya Menekan Angka Penceraian Di Mahkamah Syariah Selangor

Dalam sesuatu perkara tidak hanya memerlukan rencana dan persiapan untuk melakukan hal yang terbaik. Tetapi juga ada beberapa perkara yang menyebabkan sesuatu yang sudah direncanakan tidak berhasil di akhirnya. Seorang peguam syarie harus mempersiapkan diri dengan kendala-kendala yang mereka akan hadapai ketika cuba melakukan peran untuk menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor.

Kebiasaannya perkara ini terlihat aneh oleh masyarakat umum, yang mana mereka faham seharusnya seorang peguam syarie itu membela mereka untuk menyelesaikan kasus tetapi juga berperanan dalam menekan berbagai kasus contohnya seperti kasus penceraian.⁷³

Kendala yang dihadapi oleh seorang peguam syarie bukan hanya dari masyarakat tetapi dari berbagai sudut didalam ruangan kerja mereka. Ada kendala dari segi pemahaman, keuangan, agensi atau badan pemerintahan dan berbagai macam kendalanya. Disini dijelaskan beberapa penyebab kendala yang dihadapi oleh peguam syarie dalam menekan angka pencerain seperti berikut:

a. Klien Tidak Menjaga Komunikasi

Kebiasaannya kasus penceraian itu terjadi dikarena antara kedua pihak tidak melakukan usaha menjaga komunikasi dengan baik. Sehingga hal tersebut menjadi parah dimana suami atau istri cuba

⁷³ Zulfarnain, *wawancara* (Gombak, 22 Februari 2018).

melakukan tuntutan/permohonan penceraian di Mahkamah Syariah Selangor. Selain itu, pasangan suami istri tidak mampu mencari titik persamaan ketika menghadapi masalah rumah tangga dan menjadikan peguam syarie hanya sebagai wakil untuk menyelesaikan kasus mereka tanpa berusaha mendengarkan penjelasan maupun saran dari peguam syarie. Lebih lanjut Puan Hazirah menerangkan kendalanya seperti ini:⁷⁴

*Kebiasaan perkara yang saya terime biasanye dorang datang hanya menginginkan cerai tanpa mau mendengar penjelasan or apa-apa tentang damai. Kebiasaannya kes-kes ni dorang pedam dalam hati lame-lame sehingga dah sampai **kronik** baru nak cerai. Itulah penghalang saya untuk mendamaikan mereka dan ia juga jadi sebab dorang tak dapat bersama lagi.*

Diterjemahkan oleh peneliti: *Selalu perkara yang saya terima biasanya mereka datang hanya menginginkan penceraian tanpa mahu mendengar penjelasan atau hal yang bisa menyebabkan mereka damai. Kebiasaannya kasus-kasus ini, mereka simpan dalam hati lama-lama sehingga sudah sampai tahap bahaya baru menuntut penceraian. Itulah kendala saya untuk mendamaikan mereka dan ia juga menjadi sebab mereka tidak dapat bersama lagi.*

b. Kurangnya Program dari Pemerintah

Selain itu, kurangnya tindak balas dalam kerjasama dengan organisasi/agensi pemerintah dalam melaksanakan program seperti penerangan tentang penceraian, hak dan kewajiban didalam rumah tangga

⁷⁴ Hazirah, wawancara (Batu Caves, 23 Februari 2018)

dan lain-lain menjadi punca kendala usaha peguam syarie untuk menekan angka perceraian di Mahkamah Syariah Selangor. Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh Tuan Zulqarnain seperti berikut:⁷⁵

Halangan usaha kite selalu ade. Sebab dari pihak pejabat agama Islam tak kasi kerjasama yang baik. Dorang tak buat program yang jelas untuk kite bantu dalam bende ni. Contohnya program-program yang nak jelaskan hak dan kewajipan seorang perempuan. Biasanye perempuan tak tahu bende tu dan kite perlu jelaskan.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Kendala usaha kita selalu ada. Punca dari pejabat agama Islam tidak memberi kerjasama yang baik. Mereka tidak membuat program yang menerangkan untuk kita bantu dalam perkara ini. Misalnya program-program yang ingin menjelaskan hak dan kewajiban seorang istri. Biasanya perempuan tidak tahu perkara ini dan kita perlu terangkan.*

c. Klienna sendiri

Namun begitu, kendala yang dihadapi peguam syarie juga datang dari kliennya. Hal ini karena seorang klien biasanya mahukan keadilan yang sesuai dengan kehendaknya sehingga sebahagian kasus yang terjadi menyebabkan dampak negative kepada kedua belah pihak sama ada klienna maupun keluarga mereka. Menurut En. Imran yang merupakan seorang klien satu kasus perceraian menjelaskan seperti berikut:⁷⁶

⁷⁵ Zulqarnain, wawancara (Gombak 22 Februari 2018)

⁷⁶ Imran, wawancara (Setapak, 18 Mei 2018).

Dalam kes saye, banyak kali saye jelaskan dekat peguam saye. Yang saye nak tau bende ni terjadi seperti ini dan itu. Jarang seorang anak guam yang nak dengar pendapat peguam dorang dalam hal cerai ni.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Dalam Kasus saya, banyak sekali saya jelaskan pada peguam saya. Yang saya mahukan perkara ini terjadi seperti kehendak saya. **Tiada klien yang mahu** mendengar pendapat peguam mereka dalam perkara penceraian.*

d. Kekurangan Keuangan

Selanjutnya, kendala yang selalu terjadi kepada peguam syarie ialah terkait keuangan yang mana ia dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu program yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi peguam syarie maupun secara individu. Karena menurut Tuan Roshdan selaku peguam syarie menerangkan seperti berikut:⁷⁷

Halangan yang akan kite dapat adalah masalah duit. Kite tak seperti pejabat atau majlis agama Islam yang ada peruntukan tahunan. Yang mana kite nak lakukan program ni. Dan bende ni lah yang agak susah diketepikan kalau nak buat program atau seminar ilmu bab cerai dekat masyarakat.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Kendala yang akan kita dapat **adalah masalah keuangan** kita tidak seperti pejabat atau majlis agama Islam yang mempunyai peruntukan tahunan. Yang mana kita mahu melakukan*

⁷⁷ Roshdan, wawancara (Sri Rampai, 14 Mei 2018).

program tersebut. Dan perkara ini yang sulit disampingkan jika ingin melakukan sesuatu program atau seminar terkait penceraian pada masyarakat.

e. Tentang dari ahli Keluarga

Walaupun bagaimanapun, usaha-usaha yang dilakukan seorang peguam juga kebiasaannya tidak mengikut kemahuan ahli keluarga pasangan. Sehingga menyebabkan mereka tidak memberi kerjasama kepada peguam syarie untuk menjalankan peran menekan angka penceraian ini. Seperti yang diterangkan oleh Puan Hazirah:⁷⁸

Ade setengah kes yang saya dapat. Dari pihak keluarga dorang terutamanya ibubapa tak kasi kerjasama yang baik pada saya untuk mendamaikan anak-anak mereka. Ada jugak yang nak anak dorang cerai cepat dan ada juga biarkan je kes jadi begitu. Kadang-kadang tu kes jadi lama bertahun-tahun sebab ada yang nak cerai ada yang tak nak cerai.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Ada sebahagian kasus yang saya tangani. Dari pihak keluarga mereka terutamanya ibubapa tidak beri kerjasama yang baik pada saya untuk mendamaikan anak-anak mereka. Ada juga yang mahukan anak mereka bercerai dengan segera dan ada juga yang membiarkan saja kasus ini menjadi sengketa. Sebahagian kasus jadi lama sehingga bertahun-tahun dikarenakan ada pihak yang mahukan penceraian dan ada juga yang tidak mahukan penceraian.*

⁷⁸ Hazirah, wawancara (Batu Caves, 23 Februari 2018)

f. Kurang Nyaman Klien dan Peguam

Selain itu, menurut Amalina klien yang tidak jadi melanjutkan penceraian awal tahun 2018 mengatakan bahwa kebiasaan kendala yang terjadi peguam itu dari tidak nyaman seorang klien tersebut kepada peguam syarie yang mengendali kasusnya. Karena Amalina pernah hampir diceraikan suaminya disebabkan tindakan peguam syarie suaminya akan tetapi ia tidak berhasil karena kedua-duanya sudah menemukan titik persamaan ketika proses mediasi yang dilakukan oleh peguam syarie Amalina.⁷⁹

Tindakan peguam syarie ini bertentangan dengan kaidah perundangan bidang kuasa dan tatacara Mahkamah Syariah dan Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia No. 4 Tahun 2002 yang menjelaskan prinsip peguam syarie dalam Islam haruslah berakhlak mulia dan amanah berdasarkan syarak. Sehingga hasil sepanjang perwakilannya berjalan lancar dan baik.

⁷⁹ Amalina, *wawancara* (Klang, 5 Agustus 2018).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian ataupun pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yakni dari bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan dan peran peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor adalah mendamaikan kliennya dengan pendekatan keluarga untuk dijadikan orang tengah dalam kasus yang terjadi

dan menasihati kliennya untuk mencari titik persamaan agar perceraian tidak terjadi. Selain itu, bekerjasama dengan badan pemerintah untuk melaksanakan program penerangan tentang kewajiban dan tanggungjawab suami istri, dan memberikan saran kepada klien untuk menjaga komunikasi antara pasangan dengan baik. Seterusnya, peguam syarie menjelaskan hak-hak dan kewajiban suami istri melalui pendekatan organisasi yang wujud di masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi oleh peguam syarie antaranya kurangnya keuangan dari badan pemerintah untuk melaksanakan program penerangan terutamanya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri sehingga sering terjadi sengketa antara pasangannya. Selain itu, kebanyakan klien yang menuntut perceraian tidak menjaga komunikasi antara mereka, dan tidak mendengarkan saran yang diberikan oleh peguam syarie untuk berdamai. Seterunya, kebiasaannya klien hanya maukan keadilan yang menguntungkan dirinya sehingga terjadi perceraian, dan tidak adanya kerjasama yang baik dari pihak keluarga untuk membantu agar pasangan tidak bercerai

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, peneliti memberikan saran bagi pihak yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Saran tersebut akan diberikan sabagai berikut:

1. Bagi Peguam Syarie di Mahkamah Syariah Selangor terlepas dari sudut pandang Undang-undang dan umumnya, harus dilihat dari perannya yang lebih efektif terhadap usaha yang dilakukan bukan hanya menitik beratkan tentang pembelaan semata-mata akan tetapi menerakan nilai-nilai keadilan Islam yang sebenarnya sehingga usaha-usaha seperti mediasi, pendamaian klien dan lain-lain bisa terlaksana ketika menanggapi sesuatu kasus yang terjadi terutamanya kasus-kasus perceraian.
2. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul yang serupa atau hampir sama, harus lebih giat dalam membaca. Hal ini dikarenakan bahasan tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang peguam syarie sangatlah penting dan berbeda-beda antara prinsip seorang peguam syarie tersebut. Mahasiswa harus lebih peka terhadap jawaban dan persoalan yang ada terhadap peguam syarie karena permasalahan yang terjadi antara sesuatu kasus itu berbeda. Selain itu, Mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa haruslah aktif mencari bahan penelitian dikarenakan masih banyak yang bisa didapatkan.
3. Bagi Masyarakat akan sangat baik jika lebih memahami keperluan berbagai agensi yang ada sebelum menuntut sebuah perceraian. Tidak hanya menjadikan Mahkamah sebagai jalan terakhir akan tetapi lebih kepada jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, jadikan peguam syarie sebagai jambatan untuk membantu menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi dikarenakan seorang peguam syarie itu lebih mengetahui terhadap Undang-undang yang mengatur kasus yang dihadapi.

4. Bagi Universitas dan Jurusan skripsi atau penelitian yang peneliti buat ini bisa dijadikan tambahan bahan ajar atau tambahan pengetahuan untuk melengkapi pustakan yang mungkin suatu saat akan diperlukan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa atau hampir sama, untuk mempermudah penelitian yang terkait dengan masalah peneliti, akan lebih baik jika Universitas dan Jurusan menambah literatur-literatur yang terkait dengan peran peguam syarie. Saran ini peneliti cantumkan karena selama penelitian peneliti, peneliti hanya menemukan sebagian kecil literatur yang berhubungan dengan peguam syarie. Sebenarnya hal ini menjadi masalah, akan tetapi alangkah lebih baik jika Universitas dan Jurusan melengkapi koleksi literatur terkait untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari tentang peguam syarie.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantara Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008)

Awang Othman, Mahmud Saedon. *Institusi Pentadbiran Undang-Undang dan Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996)

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Ibrahim, Ahmad. *Etika Hakim dan Peguam*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1996)

Ibrahim, Ahmad. *Al-Ahkam Jilid 5 Penghakiman dan Kepeguaman*, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1997)

Ghazali. *Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Tahun 2002* (Putrajaya: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2002)

Hadi, Sutrisno. *Metodologi research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)

Kamal, Tajul aris dan Hisham. *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2005)

Kusuma, Nana Sudjana dan Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008)

Kamus Dewan Bahasa, Edisi Baru, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989)

Murad, Zulkifli dan Hamid. *Amalan Kehakiman Dan Guaman Syarie Di Malaysia* (Bangi: kolej Universiti Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, 2007)

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Noor, Juliansyah. “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Kencana, 2011)

Othman, Mahmud Saedon Awang. *Institusi Pentadbiran Undang-Undang dan Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996)

Subarkah, Andi. *terjemahan Al-Qur'an*, (Jawa Barat: Syaamil Quran, 2010)

Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015)

2. Perundangan-Undangan

Warta Kerajaan Selangor 24hb Julai 2003 Bahagian V, Fasal 80

Kaedah 17(1)(2), Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 2008 (Selangor)

Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) No. 4 Tahun 2002.

3. Jurnal/Skripsi

Awang, Musa. "*Peguam Syarie Di Malaysia*", *Realiti Semasa & Prospek Ke Arah Penggubalan Akta Profesion Guaman Syarie*, Jurnal, (Selangor: Persatuan Peguam Syariah Malaysia (PGSM), 2017)

Dahalan, Hammad. *Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesannya Oleh Pegawai Sulh*, (17 November, 2014).

Fathoni, Ahmad. *Peran Advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*, Skripsi, (Institusi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015)

Handayani, Febri. "*Hukum Islam Vol XV No. 1*", *Tinjauan Yuridis Terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Jurnal, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)

Jamal, Jasri. "*Pengamalan Peguam Syarie*", *Amalan dan cabaran Peguam Syarie di Malaysia pada Alaf Baru*, Jurnal, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000).

Mawaddah, Ain. *Peranan Peguam Syarie Dalam Mengendalikan Kes Murtad Dalam Kalangan Mualaf*, Skripsi, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015)

Ni'matunnuriyah, Hariyanto. "*Ulul Albab Volume 18 No 1*", *Advokat Syariah Dalam mediasi perkara perceraian menurut Maqasid AL Syariah*, Jurnal, (Pemerkesan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pemekasan, 2017).

Noraini, Siti. *Pelaksanaan Sulh dan Keberkesannya di Mahkamah Syariah Selangor*, (Augustus, 2008).

Syafirul, Mariam Majid. "*e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*", *Perceraian Rumah Tangga Di Negeri Selangor Darul Ehsan Dan Pendekatan Menanganinya*, Jurnal, (Selangor:Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2017).

4. Website

http://peguamsyarieMalaysia.blogspot.my/p/pimpinan-pgsm_28.html?m=1,
Diakses tanggal 19 januari 2018.

<http://www.utusan.com.my/berita/wilayah/pahang/peguam-syarie-jangan-langgar-etika-1.477540>, Diakses tanggal 20 November 2018.

<http://www.utusan.com.my/berita/nasional/isu-remeh-punca-perceraian-1.786878>,
Diakses tanggal 21 November 218.



DAFTAR TABEL

- TABEL I : Statistik Kasus Penceraian Tahun 2015-2017 Di Selangor
- TABEL II : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- TABEL III : Senarai Enakmen/Ordinan/Akta Berhubung Peruntukan Peguam Syarie Mengikut Negeri
- TABEL IV : Senarai Terkini Kaedah/Peraturan Peguam Syarie Mengikut Negeri
- TABEL V : Pihak-pihak Peguam Syarie yang di wawancara
- TABEL VI : Pihak-pihak klien yang di wawancara

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Mahkamah Syariah Selangor

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Surat-surat
- Lampiran 3 : Undang-undang

RIWAYAT HIDUP PENELITI**IDENTITAS DIRI**

Nama : Luqman Hakim Bin ahmad Fauzi
 TTL : Klang, Selangor, 9 Juli 1996
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Status : Belum Nikah
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Alamat : No 56, Jln Bakti 7/KU3 Taman Pinang Raja
 Sungai Pinang 42100 Klang Selangor Malaysia
 No. Tel : 0895413346974 / +601116945154
 Email : luqmanhakimahmadfauzi@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun Ajaran	Institusi	Model Institusi	Keterangan
2014 – 2018	Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Universitas Negeri	Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Lulus Tahun 2018 dengan IP 3.68/4.00.
2013 – 2014	Madrasah Al-Quran Bintulu, Sarawak	Madrasah	Pelajar Madrasah Lulus Bulan Juni 2014
2012 – 2013	Kolej Vokasional Setapak, KL	Kolej	Pelajar Kolej (Jurusan Automotif) Lulus tahun 2013 dengan prediket A automotif dan

			SPM 7A
2011 – 2012	Sekolah Menengah Seri Gombak, Selangor	Sekolah Menengah	Pelajar Menengah Lulus 2012 dengan prediket PMR 4A
2009 – 2011	Sekolah Menengah Tinggi Klang, Selangor	Sekolah Menengah	Pelajar Menengah pindah Sekolah tahun 2011 bulan Februari
2003 – 2008	Sekolah Agama Rendah Integrasi Ampuan Klang, Selangor	Sekolah Rendah Agama	Pelajar Rendah Lulus tahun 2008 UPSR 1A





ALUR WAWANCARA

Di bawah ini petikan wawancara dengan peguam syarie dan klien mengenai peran peguam syarie dalam upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor.

1. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Peguam Syarie dalam upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor?
2. Apakah kendala yang dihadapi semasa melakukan upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor?
3. Berapa lama pengalaman bekerja sebagai Peguam Syarie di Selangor?
4. Apakah latarbelakang pendidikan sebelum menjadi seorang Peguam Syarie?
5. Bagaimana tindakan yang dilakukan Peguam Syarie Anda sepanjang proses penceraian?
6. Apakah usaha yang dilakukan Peguam Syarie Anda dalam kasus tuntutan penceraian?
7. Apakah saran Anda kepada Peguam Syarie yang masih tidak melakukan upaya menekan angka penceraian di Mahkamah Syariah Selangor?

ASRI MUSA & CO.

*Peguambela & Peguamcara • Advocates & Solicitors
Syarie Counsel*

No. B-10-2, Blok B, Jalan Medan Selayang 1, Medan Selayang,
68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.
Tel : 03-6184 1270, 03-6184 1271, 03-6177 3583 Faks : 03-6184 2271
E-mail : asrimusa_co@hotmail.com, asrimusaco@gmail.com

MOHD ASRI BIN MUSA
LL.B (Hons), LL.B (Shariah) (Hons), IIUM
MADHI BIN HASAN
LL.B (Hons), IIUM, M.Political Sc., UKM

DR. ZULQARNAIN BIN LUKMAN
LL.B (Hons), LL.B (Shariah) Hons, MCL IIUM
Ph.D (Const), IIUM

WAN ANWAR BIN WAN IBRAHIM
LL.B (Hons), LL.M (Banking Law), IIUM
Syarie Counsel

SHARIFAH SUMAYYAH BINTI SYED MALICK
LL.B (Hons), LL.B (Shariah) (Hons), IIUM

AUZAIE BIN SHAMSUL MA'ARIF
LL.B (Hons), LL.B (Shariah) (Hons), IIUM

Ruj. Kami: **AMC/01/INTERVIEW/STUDENT/18**

Ruj. Tuan:

23/02/2018

Tarikh:

EN. LUQMAN HAKIM BIN AHMAD FAUZI
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG,
Fakultas Syariah,
Jl. Gajayana 50
Malang 65144

Tuan,

PER: PERSETUJUAN UNTUK TEMUBUAL

Tajuk: PERANAN PEGUAM SYARIAH DALAM MENURUNKAN JUMLAH PERCERAIAN

Kami merujuk kepada perkara di atas.

Kami dengan ini mengesahkan bahawa DR. ZULQARNAIN BIN LUKMAN telah bersetuju untuk ditemubual oleh pihak Encik berkaitan tajuk di atas pada 22/02/2018 bertempat di pejabat kami.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Untuk dan bagi pihak **TETUAN ASRI MUSA & CO.**





Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JKSM/100-24/5 (15)
Takwim : 14 Jamadil Akhir 1423
Tarikh : 23 Ogos 2002

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri-negeri

Arahan Amalan No. 4 Tahun 2002

Etika Peguam Syarie

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.3 Tahun 2002 pada 7 Mei 2002 di Johor Bahru bersamaan 25 Safar 1423 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung semua Peguam Syarie yang yang beramal di Mahkamah Syariah adalah terikat dengan Etika Peguam Syarie 2001.

2. Etika Peguam Syarie yang dimaksudkan adalah sebagaimana [lampiran](#).

Arahan amalan ini berkuatkuasa 1 Jun 2002.

(Dato' Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab.
Rahman) Ketua Pengarah/Ketua
Hakim Syarie Jabatan Kehakiman
Syariah Malaysia.

PUTRAJAYA
2002

Lampiran

AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM

ETIKA PEGUAM SYARIE

PADA menjalankan kuasa yang diberi menurut (peruntukan undang-undang yang sedia ada...) maka diperbuat etika berikut :

1. Nama

Etika ini bolehlah dinamakan Etika Peguam Syarie.

2. Tafsiran

Dalam etika ini, melainkan jika konteksnya menghendaki maknanya yang lain –

“Jawatankuasa” ertinya Jawatankuasa Peguam Syarie di bawah (peruntukan undang-undang yang sedia ada...)

“Peguam Syarie” ertinya seseorang berkelayakan yang diterima sebagai Peguam Syarie di bawah (peruntukan undang-undang yang sedia ada...) dan termasuklah mana-mana Pendakwa Syarie, dan mana-mana orang yang dilantik di bawah seksyen 3(2) Akta Bantuan Guaman 1971, Akta 26.

3. Akhlak dan peranan Peguam Syarie

Peguam Syarie hendaklah mempunyai akhlak, sikap dan tingkah laku yang mulia, dan dalam melaksanakan tugas dan peranannya hendaklah bersifat amanah, jujur dan berniat baik untuk menegakkan keadilan.

4. Meningkatkan pengetahuan

Peguam Syarie hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan Hukum Syarak dan undang-undang supaya tugas guaman dapat dijalankan dengan lebih cekap dan berkesan.

5. Peguam Syarie tidak diwajibkan bertindak bagi tiap-tiap orang

Tiada seorang Peguam Syarie diwajibkan bertindak sebagai penasihat atau peguambela bagi tiap-tiap orang yang hendak menjadi kelayannya; tetapi dia hendaklah sanggup menerima apa-apa arahan Mahkamah-mahkamah di mana dia menjalankan amalan dengan bayaran profesional yang wajar bergantung kepada lamanya tempoh yang diperlukan bagi menyediakan dan juga rumitnya kes itu; dengan syarat bahawa jika terdapat keadaan khas yang tidak mengizinkan, dia boleh, menurut budi bicaranya enggan menerima sesuatu arahan tertentu.

6. Peguam Syarie tidak boleh menerima sesuatu arahan (brief / kemahuan kelayan / kehendak kelayan) jika dalam keadaan serbasalah.

- (a) Peguam Syarie tidak boleh menerima sesuatu arahan (brief / kemahuan kelayan / kehendak kelayan) jika dengan menerimanya dia akan berada dalam keadaan serbasalah.
- (b) Keadaan serbasalah itu mungkin timbul -
 - (i) Jika dia dapati ada dalam miliknya maklumat sulit hasil daripada nasihat yang telah diberi sebelumnya kepada seorang lain berkenaan dengan perkara yang sama;
 - (ii) Jika ada sesuatu perhubungan peribadi antaranya dengan suatu pihak atau seorang saksi dalam perbicaraan itu.

7. Peguam Syarie tidak boleh menerima arahan jika kelakuan profesionalnya mungkin dipersoalkan.

Peguam Syarie tidak boleh menerima sesuatu arahan dalam sesuatu kes jika dia tahu atau ada sebab bagi mempercayai bahawa kelakuan profesionalnya sendiri mungkin dipersoalkan.

8. Peguam Syarie tidak boleh menerima arahan (brief / kehendak kelayan / kemahuan kelayan) jika dia sukar menyenggara kebebasan profesionalnya.

- (a) Peguam Syarie tidak boleh menerima sesuatu arahan jika penerimaan itu menyebabkan atau akan menyebabkan dia sukar untuk menyenggara kebebasan profesionalnya atau bertentangan dengan kepentingan pentadbiran keadilan yang terbaik.
- (b) Peguam Syarie yang telah, pada bila-bila masa, menasihatkan atau membuat guaman, atau bertindak bagi suatu pihak berhubung dengan mengadakan atau menjalankan pendakwaan atau membela sesuatu guaman, rayuan atau lain-lain perbicaraan tidak boleh bertindak, hadir atau berguam bagi pihak lawan dalam guaman, rayuan atau lain-lain perbicaraan tersebut.

9. Peguam Syarie tidak boleh menerima arahan jika dia tidak dapat hadir

Peguam Syarie tidak boleh menerima sesuatu arahan melainkan dia dengan pasti secara munasabah akan dapat hadir dan mewakili kelayan itu pada hari yang kehendaki.

10. Peguam Syarie tidak boleh dilepaskan dari tugas.

Tertakluk kepada apa-apa kaedah Mahkamah yang dibuat bagi maksud ini. Peguam Syarie yang ditugaskan dalam sesuatu perkara mal atau jenayah –

- (a) melainkan dengan persetujuan Mahkamah, tidak boleh menarik diri dari sesuatu tugas setelah sahaja tugas itu diterima, tanpa sebab yang mencukupi melainkan notis yang berpatutan dan mencukupi diberi kepada kelayan itu;
- (b) hendaklah sentiasa menjalankan segala daya usahanya dalam pertugasan itu jika tidak mendapat persetujuan Mahkamah untuk menarik diri.

11. Peguam Syarie hendaklah menjalankan pembelaan dengan cara yang saksama dan terhormat

Peguam Syarie yang menjalankan pembelaan bagi seseorang dalam apa-apa perkara jenayah, hendaklah bertanggung dengan segala cara yang saksama dan terhormat mengemukakan setiap pembelaan yang dibenarkan oleh undang-undang.

12. Fi bagi perkara-perkara yang rumit atau dipertikaikan

Bagi menentukan amaun fi bagi perkara-perkara yang rumit atau dipertikaikan yang melibatkan seseorang kelayan diwakili dalam Mahkamah, maka wajarlah diambilkira –

- (a) masa, tenaga dan kemahiran yang diperlukan;
- (b) kebaharuan dan rumitnya soalan yang terlibat;
- (c) sama ada penerimaan tugas tertentu itu akan menghalang harapannya untuk hadir bagi pihak-pihak lain;
- (d) fi biasa profesion bagi perkhidmatan yang serupa;
- (e) amaun yang dipertikaikan;
- (f) faedah yang akan didapati oleh kelayan dari perkhidmatannya;
- (g) corak tugas itu – sama ada luar jangka atau bagi kelayan yang tetap;
- (h) kedudukan khas atau kekananan Peguam Syarie tertentu.

13. Peguam Syarie tidak boleh menjalankan kes mal yang dimaksudkan untuk melambatkan perbicaraan

Peguam Syarie tidak boleh menjalankan sesuatu atau membuat pembelaan yang mana adalah dimaksudkan semata-mata untuk melambatkan perbicaraan atau menyusahkan atau memudaratkan pihak lawan atau untuk melakukan penindasan atau sesuatu yang salah.

14. Menghormati Mahkamah

Peguam Syarie hendaklah sentiasa menghormati dan tidak boleh melakukan perdayaan ke atas Mahkamah.

15. Peguam Syarie hendaklah mempertahankan kepentingan keadilan, kelayannya dan kehormatan profesionnya.

Peguam Syarie hendaklah, sambil bertindak dengan segala tertib di hadapan mahkamah di mana ia hadir, dan berani mempertahankan kepentingan keadilan, kelayannya dan kehormatan profesionnya.

16. Peguam Syarie hendaklah berkelakuan jujur, tertib dan saksama

Peguam Syarie hendaklah berkelakuan jujur, tertib dan saksama di hadapan Mahkamah dan lain-lain Peguam Syarie

17. Peguam Syarie tidak boleh merujuk atau menegaskan kepada fakta yang tidak dibuktikan.

Dalam membuka sesuatu kes atau mengemukakan hujahnya, Peguam Syarie tidak boleh merujuk atau menegaskan apa-apa fakta dalam kes itu yang tidak dapat dibuktikannya.

18. Peguam Syarie hendaklah mengemukakan kepada Mahkamah keputusan yang masih berkuatkuasa.

- (a) Peguam Syarie hendaklah mengemukakan kepada Mahkamah apa-apa keputusan yang masih berkuatkuasa yang dia tahu adalah berkaitan dengan perkara yang sedang dipertimbangkan di hadapan Mahkamah, sama ada keputusan itu menyokong atau menentang hujahnya.
- (b) Etika ini adalah terpakai khususnya dalam prosiding *ex-parte*

19. Penyalahnyataan (misquote) adalah tidak wajar

Peguam Syarie tidak wajar –

- (a) menyalahnyatakan dengan diketahuinya kandungan sesuatu kertas, keterangan seseorang saksi, hujah pihak lawan atau bahasa sesuatu penghakiman atau buku teks;
- (b) menyatakan sebagai otoriti suatu keputusan yang telah dibatalkan atau suatu status yang telah dimansuhkan;

20. Peguam Syarie boleh membawa kepada perhatian Mahkamah kedudukan dan keputusan undang-undang.

- (a) Jika selepas keterangan dan hujah ditutup dan semasa keputusan ditangguhkan, seseorang Peguam Syarie dapat tahu akan suatu kedudukan undang-undang atau akan suatu keputusan undang-undang, yang mana adalah berkaitan secara langsung, dia hendaklah membawanya kepada perhatian Mahkamah dan pihak lawan dan pihak itu hendaklah bersetuju dengan kedudukan atau keputusan itu walaupun menentangnya.

- (b) Jika pihak lawan tidak bersetuju, Peguam Syarie yang mengemukakan kedudukan atau keputusan undang-undang masih boleh mengemukakan otoriti tambahan itu kepada Mahkamah dengan satu salinan suratnya kepada pihak lawannya untuk membolehkannya memberi ulasan mengenainya jika dibenarkan oleh Mahkamah.

21. Peguam Syarie hendaklah memberi kepada Mahkamah semua maklumat

Peguam Syarie hendaklah memberi kepada Mahkamah segala maklumat mengenai jangkamasa yang dijangkakan bagi sesuatu kes dan kemungkinan suatu penyelesaian.

22. Peguam Syarie hendaklah sedia untuk perbicaraan pada hari yang ditetapkan

- (a) Peguam Syarie hendaklah menjalankan segala usaha supaya sedia untuk perbicaraan pada hari yang ditetapkan.
- (b) Peguam Syarie hendaklah memohon penangguhan sesuatu kes yang telah ditetapkan perbicaraannya hanya atas sebab-sebab yang baik dan memaksa.
- (c) Kecuali dalam kecemasan, adalah tak wajar bagi Peguam Syarie memohon sesuatu penangguhan jika Peguam Syarie bagi pihak yang satu lagi itu tidak hadir melainkan jika ia telah memberi kepada semua Peguam Syarie yang berkenaan notis sekurang-nya empat puluh lapan jam mengenai cadangan hendak membuat permohonan itu.

23. Peguam Syarie hendaklah menzahirkan kepada kelayan segala hal keadaan

Peguam Syarie pada masa dia dilantik hendaklah menzahirkan kepada kelayan segala hal keadaan hubungannya dengan pihak-pihak yang berkenaan, dan apa-apa kepentingan berhubung dengan perbalahan itu, yang mungkin mempengaruhi kelayan dalam memilik Peguam Syarie.

24. Peguam Syarie tidak boleh mengelirukan

Peguam Syarie hendaklah mengelakkan segala perkara yang boleh mengelirukan pihak yang tidak diwakili oleh Peguam Syarie.

25. Peguam Syarie tidak boleh hadir jika dia mempunyai kepentingan kewangan

- (a) Peguam Syarie tidak boleh hadir dalam apa-apa perkara dalam mana dia mempunyai kepentingan kewangan secara langsung atau tidak langsung;
- (b) Etika ini tidak dipakai bagi seseorang Peguam Syarie yang hadir sendiri untuk menetapkan kosnya sendiri.

26. Peguam Syarie tidak boleh hadir mengendalikan sesuatu kes di mana dia menjadi saksi.

- (a) Peguam Syarie tidak boleh hadir mengendalikan sesuatu kes di dalam Mahkamah atau dalam Kamar di mana dia ada sebab bagi mempercayai bahawa dia akan menjadi seorang saksi mengenai sesuatu soal fakta yang matan dan dipertikaikan, dan jika semasa hadir dalam mengendalikan sesuatu kes dia didapati akan menjadi saksi sebagai demikian, dia hendaklah jangan hadir mengendalikan kes itu seterusnya.

- (b) Peguam Syarie tidak boleh hadir mengendalikan kes di hadapan Mahkamah Rayuan jika dalam kes yang menjadi perkara rayuan itu dia telah menjadi seorang saksi mengenai sesuatu soal fakta yang matan dan dipertikaikan dalam Mahkamah di peringkat bawah;
- (c) Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Etika ini boleh menghalang seseorang Peguam Syarie daripada mengangkat sumpah atau berikrar sesuatu affidavit mengenai fakta-fakta normal atau fakta-fakta yang tidak dipertikaikan mengenai perkara-perkara dalam mana dia bertindak mengendalikan kes atau hadir sebagai saksi.

27. Peguam Syarie hadir sebagai satu pihak atau saksi tidak boleh memakai jubah

- (a) Peguam Syarie semasa hadir sendiri sebagai satu pihak atau apabila berada dalam kandang saksi tidak boleh memakai jubah;
- (c) Kecuali dalam upacara-upacara dan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Mahkamah, seseorang Peguam Syarie tidak boleh memakai jubah di tempat awam lain daripada dalam mahkamah atau dalam perjalanan pergi atau balik dari Mahkamah.

28. Peguam Syarie hendaklah mempertahankan kehormatan dan profesionnya

Tiap-tiap Peguam Syarie hendaklah sentiasa mempertahankan kehormatan dan taraf profesionnya.

29. Perasaan kelayan tidak boleh mempengaruhi kelakuan peguam

Walau apapun perasaan yang sedia ada di antara kelayan-kelayan, perasaan itu tidak boleh dibiarkan mempengaruhi Peguam Syarie dalam kelakuan dan tingkah

lakunya terhadap satu sama lain atau terhadap pihak-pihak dan saksi-saksi mereka dalam kes itu.

30. Peguam Syarie hendaklah sentiasa melayan saksi pihak yang menentang dengan saksama dan timbang timbangrasa

Peguam Syarie hendaklah sentiasa melayani saksi-saksi dan pihak-pihak yang menentang dengan saksama dan timbangrasa dan dia hendaklah jangan sekali-kali memberi galakan kepada niat jahat atau prasangka seseorang kelayan dalam menjalankan sesuatu kes.

31. Peguam Syarie tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diletakkan padanya oleh kelayan.

- (a) Peguam Syarie hendaklah jangan melakukan sesuatu untuk faedah atau keuntungannya dengan menyalahgunakan atau mengambil kesempatan atas kepercayaan yang diletakkan padanya oleh kelayan.
- (b) Peguam Syarie hendaklah mengekalkan kepercayaan kelayannya dan kewajiban itu hendaklah dikekalkan sepanjang penggajiannya.

32. Peguam Syarie hendaklah mencegah kelayannya daripada melakukan kelakuan tak baik terhadap Mahkamah dll

Peguam Syarie hendaklah berikhtiar sedaya upaya untuk mencegah kelayannya daripada melakukan perkara-perkara yang Peguam Syarie sendiri tidak patut lakukan, terutama sekali berkenaan dengan kelakuannya terhadap Mahkamah dan pegawai-pegawai kehakiman, saksi-saksi dan pihak-pihak yang berkenaan. Jika seseorang kelayan berkeras hendak melakukan perbuatan salah seperti itu, Peguam Syarie itu hendaklah menamatkan perhubungannya.

33. Peguam Syarie yang menulis untuk akhbar tidak boleh memperihalkan dirinya sebagai Peguam Syarie

Tetakluk kepada etika 34, seseorang Peguam Syarie yang menulis untuk akhbar atau untuk diterbitkan kecuali atas sifat profesionalnya mestilah mengambil langkah-langkah munasabah untuk menjamin supaya tiada apa perihal mengenainya sebagai seorang Peguam Syarie atau mengenai tugas undang-undangnya terhadap berhubung dengan makalahnya.

34. Pengecualian

Etika 33 tidak boleh dipakai bagi yang berikut:

- (a) Di mana seseorang Peguam Syarie menerbitkan suatu buku teks undangundang (sama ada atau tidak bersesama dengan seorang yang bukan Peguam Syarie) nama dan kelulusannya serta rujukan mengenai buku-buku teks lain yang mungkin telah ditulis olehnya boleh dinyatakan pada kulit atau muka surat tajuknya atau dalam iklan-iklan mengenainya.
- (b) Seseorang Peguam Syarie yang telah bersara dari amalan boleh menulis riwayat pengalaman-pengalamannya sebagai Peguam Syarie, tetapi hendaklah sentiasa ingat bahawa dia tidak berhak mengkhianati kepercayaan yang telah diletakkan padanya oleh kelayan-kelayan;
- (c) Di mana seseorang Peguam Syarie menulis makalah untuk jurnal undangundang

35. Peguam Syarie tidak boleh memperihalkan dirinya sebagai Peguam Syarie tanpa izin Jawatankuasa

Peguam Syarie yang hendak memberi suatu syarahan atau suatu siaran mengenai suatu perkara undang-undang atau *quasi* undang-undang tidak boleh membenarkan dirinya diperihalkan, tanpa izin Jawatankuasa.

36. Peguam Syarie tidak boleh menjadi penjamin

Peguam Syarie tidak boleh menjadi seorang penjamin atau *bailor* bagi kelayannya yang dikehendaki bagi maksud apa-apa perbincangan undang-undang.

37. Peguam Syarie tidak boleh berhubung dengan orang yang diwakili oleh Peguam Syarie lain

Peguam Syarie tidak boleh berhubung dengan seseorang mengenai apa-apa perkara yang berkenaan dengannya dia tahu orang tersebut adalah diwakili oleh seorang Peguam Syarie lain kecuali dengan izin yang nyata dari Peguam Syarie yang lain itu.

38. Peguam Syarie tidak boleh membangkitkan perselisihan dan guaman

Seseorang Peguam Syarie tidak boleh menawar nasihat tanpa diminta kepada seseorang supaya membawa sesuatu tindakan atau supaya membangkitkan perselisihan dan guaman.

39. Peguam Syarie tidak boleh menjalankan secara aktif apa-apa *tred*

- (a) Peguam Syarie tidak boleh secara aktif atau mengambil bahagian dalam atau menjadi seorang pekongsi apa-apa *tred* yang boleh menjejaskan apa-apa perkhidmatan kepada kelayannya.
- (b) Peguam Syarie tidak boleh menjadi pekerja bergaji sepenuh masa bagi mana-mana orang, firma (lain daripada Peguam Syarie dan peguamcara atau firma peguambela dan peguamcara) atau perbadanan selagi dia

menjalankan amalan dan hendaklah apabila memegang apa-apa pekerjaan seperti itu memberitahu hal itu kepada Jawatankuasa dan mengambil langkah-langkah untuk berhenti menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie selagi dia memegang pekerjaan itu , dengan syarat perenggan ini tidak terpakai bagi Peguam Syarie Biro Bantuan Guaman dan Panel Peguam yang dilantik di bawah seksyen 5 Akta BBG 1971.

40. Peguam Syarie tidak boleh mengiklan

Peguam Syarie tidak boleh memujuk rayu kerja atau mengiklan, sama ada secara langsung atau secara tak langsung, sama ada dengan pekeliling, iklan, melalui peraih langganan, perhubungan sendiri, temuramah yang tidak diperlukan oleh pertalian peribadi, dengan memberi atau menimbulkan komen-komen suratkhbar atau dengan mendapatkan gambarnya disiarkan berhubung dengan kes-kes dalam mana dia telah dipertugaskan atau mengambil bahagian.

41. Peguam Syarie tidak boleh mengiklankan dirinya

Peguam Syarie tidak boleh melakukan atau menyebabkan atau membenarkan dilakukan apa-apa perkara dengan tujuan utamanya untuk mengiklan dirinya, atau apa-apa perkara yang dikira sebagai menyaranakan bahawa dia adalah bertujuan sedemikian.

42. Peguam Syarie tidak boleh mengadakan temuramah

Peguam Syarie tidak boleh mengadakan temuramah dengan akhbar atau memberi maklumat kepadanya mengenai kehidupan, amalan atau pendapatannya sebagai Peguam Syarie.

43. Peguam Syarie tidak boleh menyiarkan fotografinya

Peguam Syarie tidak boleh mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan fotografinya sebagai Peguam Syarie disiarkan dalam akhbar atau mana-mana terbitan berkala.

44. Peguam Syarie tidak boleh memujuk rayu untuk mendapatkan laporan

Peguam Syarie tidak boleh memujuk rayu untuk mendapatkan laporan dibuat mengenai apa-apa perkara dalam mana dia telah dipertugaskan secara profesional, tetapi dia boleh menimbangkan dan menyemak laporan-laporan mengenai kes-kes dalam mana dia telah dipertugaskan secara profesional bagi memastikan laporan itu adalah tepat.

45. Peguam Syarie tidak boleh mengiklankan alamat

- (1) Peguam Syarie tidak boleh mengiklankan alamatnya atau alamat firmannya dalam apa-apa buku, risalah, akhbar, terbitan berkala, penerbitan lain, media cetak atau media elektronik atau mengizin diterbitkan sama ada dalam akhbar atau lain-lain terbitan notis-notis atau makalah-makalah mengenai kelulusan atau merit profesionnya dengan syarat bahawa etika ini tidak dipakai bagi percetakan nama dan alamat mana-mana Peguam Syarie dalam senarai Undang-Undang, Buku Panduan Undang-Undang, Diari Undang-Undang dan apa-apa buku panduan lain yang diizinkan oleh Jawatankuasa yang dari semasa ke semasa, atau dalam mana-mana buku panduan telefon dalam Malaysia, termasuk bahagiannya yang dikhaskan untuk iklan-iklan dan dikenali sekarang sebagai "halaman kuning" atau dalam notis-notis biasa undang-undang yang disiarkan dalam akhbar atau lain-lain terbitan.
- (2) Bagi maksud perenggan ini, ukuran bagi iklan yang dibenarkan adalah seperti berikut:-
 - (a) papan tanda firma berukuran tidak lebih 75 cm X 60 cm
 - (b) kad perniagaan berukuran biasa dengan tidak lebih 9cm X 5.5cm.

46. Peguam Syarie tidak boleh melakukan atau menyebabkan dilakukan meraih langganan

Peguam Syarie tidak boleh melakukan atau menyebabkan atau membenarkan dilakukan apa-apa perkara bagi maksud meraih langganan secara langsung atau secara tak langsung, atau yang dikira sebagai menyaranakan bahawa ia adalah dilakukan bagi maksud tersebut.

47. Kos atau keuntungan dengan mana-mana orang yang tak berkelayakan tidak boleh dibahagi-bahagi

(1) Peguam Syarie tidak boleh:-

(a) membahagikan atau bersetuju membahagikan mana-mana kos yang diterima atau keuntungan yang diperolehi dari perniagaan guamannya dengan mana-mana orang yang tidak berkelayakan; atau

(b) membayar, memberi atau bersetuju membayar atau memberi apa-apa kamsen atau ganjaran atau balasan berharga kepada mereka yang tidak berkelayakan, untuk mendapatkan atau mempengaruhi atau kerana telah mendapatkan atau mempengaruhi apa-apa urusan undang-undang dan sama ada pembayaran, pemberian atau perjanjian ini dibuat berdalihkan perkhidmatan yang diberi atau selainnya; tetapi etika ini tidak dimaksudkan untuk melarang pembayaran bonus-bonus biasa kepada kakitangan;

(2) Peguam Syarie tidak boleh mengenakan caj untuk perkhidmatannya kurang atau lebih daripada skala yang ditetapkan oleh undang-undang kecuali atas sesuatu sebab yang khas di mana caj tidak dikenakan langsung.

48. Kamsen agensi atau kos keuntungan

Kamsen agensi atau kos keuntungan boleh dibenarkan di antara Peguam Syarie yang menjalankan amalan dalam Malaysia dengan ejen atau ejen-ejennya yang dilantik untuk menjalankan amalan guaman dalam atau luar Malaysia.

49. Peguam Syarie tidak boleh hadir bagi sesuatu pihak yang diwakili oleh Peguam Syarie lain

Jika dalam apa-apa perkara atau perbicaraan nama seseorang Peguam Syarie atau nama firmannya terdapat dalam rekod bagi mana-mana pihak, atau seseorang Peguam Syarie diketahui sebagai bertindak bagi sesuatu pihak dalam sesuatu perkara sama ada dalam Mahkamah atau tidak, tiada Peguam Syarie lain boleh, dengan diketahuinya, bersetuju, hadir atau bertindak seterusnya bagi pihak itu dalam perkara atau perbicaraan tersebut melainkan jika –

- (a) dia mendapat izin Peguam Syarie yang pertama tersebut; atau
- (b) dia berpuas hati bahawa saraan profesional yang wajar bagi Peguam Syarie yang pertama tersebut telah dibayar atau dia mengakujaji bahawa dia akan dibayar; atau
- (c) dia telah pun, tanpa mengetahui nama itu ada dalam rekod tersebut atau Peguam Syarie tersebut telah bertindak sedemikian, bersetuju hadir atau bertindak bagi pihak tersebut dan tidak boleh oleh sebab hal keadaan atau keperluan yang mendesak atau oleh apa-apa sebab seumpamanya, enggan hadir atau bertindak selanjutnya bagi pihak tersebut, tanpa mendedahkan dirinya kepada pertuduhan melanggar kewajipan profesional, atau
- (d) Peguam Syarie yang pertama tersebut itu tidak sanggup atau telah enggan bertindak selanjutnya bagi pihak tersebut dan dalam hal

demikian dia hendaklah, jika dikehendaki, melindungi apa-apa *lien* yang mungkin ada pada Peguamcara yang pertama tersebut itu terhadap kos.

50. Lien Peguam Syarie

Kecuali bagi maksud membolehkannya mendapatkan lien seseorang Peguam Syarie boleh menahan kertas kelayan hingga memudaratkan kepentingan kelayan itu.

51. Penghakiman kerana engkar

Jika nama Peguam Syarie atau nama firmannya terdapat dalam rekod Mahkamah atau jika fakta mengenai perwakilan adalah diketahui oleh pihak yang satu lagi itu, tiada Peguam Syarie yang mewakili pihak yang satu lagi itu dalam perbicaraan itu boleh mengambil tindakan untuk mendapatkan hukuman kerana engkar terhadap kelayan Peguam Syarie yang pertama tersebut itu atau mengambil kesempatan atas kelambatan Peguam Syarie yang pertama tersebut itu membuat guaman atau memfailkan dokumen-dokumen dalam bentuk guaman atau dalam mengambil apaapa langkah yang perlu atau dalam mematuhi mana-mana perintah dalam perbicaraan itu, melainkan jika dia telah memberi kepada Peguam Syarie yang pertama tersebut itu notis bertulis mengenai tujuannya hendak berbuat demikian, dan tempoh tujuh hari telah berlalu selepas notis itu diserahkan kepada Peguam Syarie yang pertama tersebut itu.

52. Lanjutan masa untuk pliding

Jika suatu lanjutan masa untuk membuat pliding diberi kepada sesuatu pihak, Peguam Syarie yang mewakili pihak itu hendaklah, jika dikehendaki, bersetuju menerima notis singkat untuk perbicaraan diadakan pada persidangan Mahkamah yang berikutnya mengenai sesuatu kes di mana, jika sekiranya pliding itu diserahkan dalam masa yang biasanya dihadkan tanpa apa-apa lanjutan, pihak yang membenarkan lanjutan masa tentu sekali boleh memberi notis untuk perbicaraan diadakan pada persidangan Mahkamah yang tersebut.

53. Pejabat cawangan tidak boleh diadakan tanpa Peguam Syarie

- (1) Peguam Syarie tidak boleh menyelenggarakan suatu pejabat cawangan melainkan jika pejabat cawangan itu diawasi sepenuhnya dan berterusan oleh seorang Peguam Syarie.
- (2) Peguam Syarie tidak boleh menjalankan amalan profesionnya dalam Negerinegeri di Malaysia dalam atau sebagai pekongsi bagi dua atau lebih dari satu firma pada bila-bila masa tanpa izin Jawatankuasa.
- (3) Peguam Syarie tidak boleh menjalankan amalan profesionnya melainkan jika ia menyelenggarakan suatu pejabat dalam mana-mana negeri di Malaysia.

54. Agensi tiada kaitan

Peguam Syarie tidak boleh membiarkan dirinya dikawal atau dieksploitasi oleh mana-mana agensi tiada kaitan yang menjadi perantaraan antara kelayan dengannya.

Bertarikh 2 Mei 2001

[JKSM : PN(U)]

(DATO' SHEIKH GHAZALI BIN ABDUL RAHMAN)

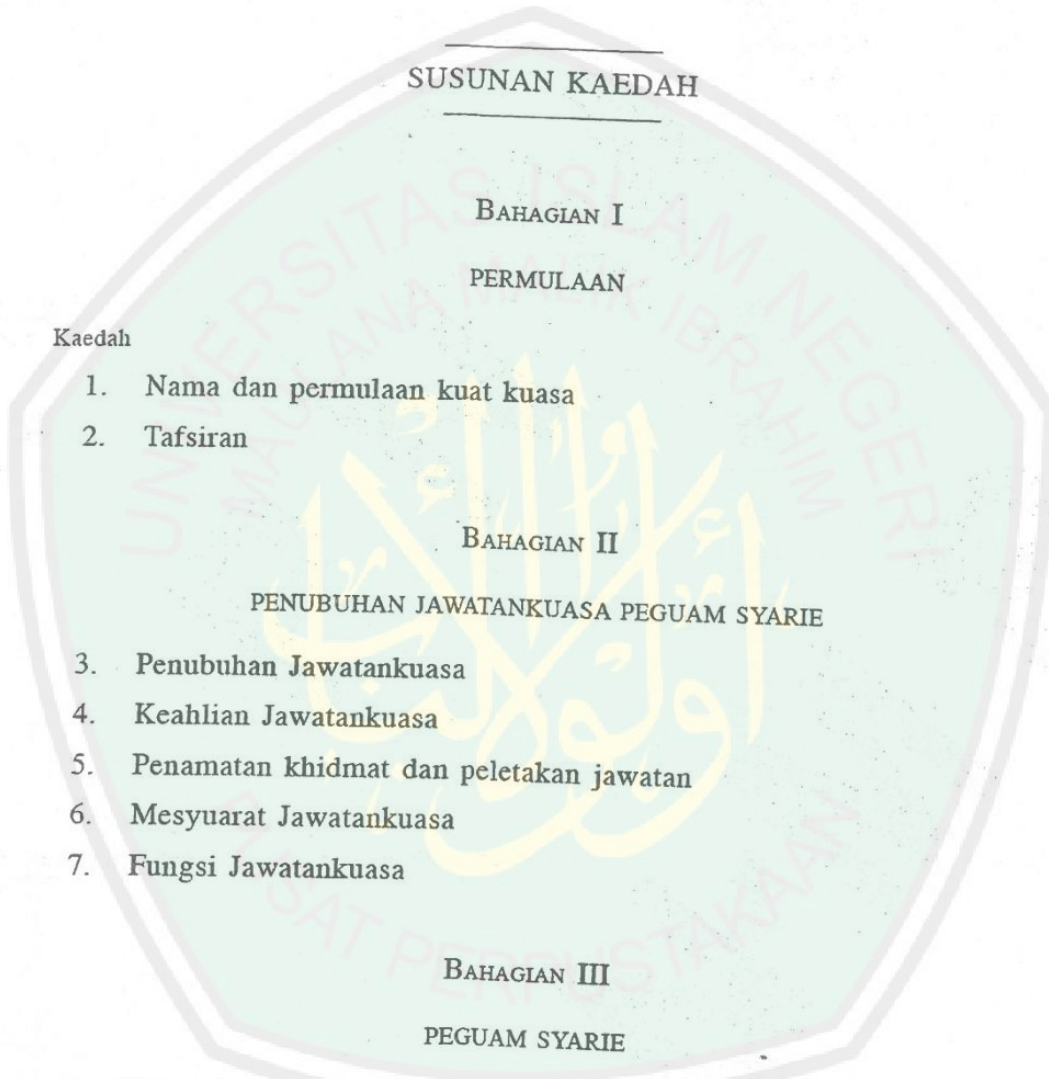
Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia



Sel. P.U. 23.

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI SELANGOR) 2008



SUSUNAN KAEDAH

BAHAGIAN I
PERMULAAN

Kaedah

1. Nama dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran

BAHAGIAN II
PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE

3. Penubuhan Jawatankuasa
4. Keahlian Jawatankuasa
5. Penamatan khidmat dan peletakan jawatan
6. Mesyuarat Jawatankuasa
7. Fungsi Jawatankuasa

BAHAGIAN III
PEGUAM SYARIE

8. Kelayakan sebagai Peguam Syarie
9. Permohonan
10. Bantahan
11. Perakuan
12. Pemberitahuan
13. Sijil Peguam Syarie
14. Perisytiharan oleh Mahkamah Tinggi Syariah

Kaedah

15. Sijil Amalan Guaman Syarie
16. Daftar Peguam Syarie

BAHAGIAN IV

PROSEDUR TATATERTIB

17. Tindakan tatatertib
18. Aduan terhadap Peguam Syarie
19. Siasatan
20. Kuasa Majlis mengeluarkan perintah
21. Permohonan untuk dikeluarkan nama dari Daftar
22. Permohonan untuk dilantik semula sebagai Peguam Syarie

BAHAGIAN V

PERUNTUKAN AM

23. Mengemukakan Sijil Amalan Guaman Syarie
24. Pembaharuan Sijil Amalan Guaman Syarie
25. Sekatan
26. Penalti
27. Pemansuhan dan kecualian

JADUAL 1

JADUAL 2

JADUAL 3

JADUAL 4

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI SELANGOR) 2008

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 80(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen No. 1 tahun 2003*], Majlis dengan kelulusan Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat Kaedah-kaedah seperti yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan **Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008**.

(2) Kaedah-kaedah ini hendaklah berkuat kuasa pada 20 November 2008.

Tafsiran

2. Dalam Kaedah-kaedah ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“Daftar Peguam Syarie” ertinya Daftar Peguam Syarie yang disebutkan di dalam kaedah 16;

“Jawatankuasa” ertinya Jawatankuasa Peguam Syarie yang ditubuhkan di bawah kaedah 3;

“Majlis” ertinya Majlis Agama Islam Negeri Selangor yang ditubuhkan di bawah subseksyen 4(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;

“Peguam Persekutuan” ertinya pegawai di dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan yang dilantik sebagai Peguam Persekutuan; dan

“Peguam Syarie” ertinya seseorang yang telah diterima masuk sebagai Peguam Syarie di Mahkamah Tinggi Syariah dan didaftarkan di bawah Kaedah-kaedah ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain sebelum Kaedah ini berkuat kuasa.

BAHAGIAN II

PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE

Penubuhan Jawatankuasa

3. Majlis hendaklah menubuhkan suatu Jawatankuasa yang dipanggil "Jawatankuasa Peguam Syarie".

Keahlian Jawatankuasa

4. (1) Jawatankuasa hendaklah terdiri dari—
- (a) Ketua Hakim Syarie, sebagai Pengerusi;
 - (b) Penasihat Undang-Undang Negeri atau wakilnya;
 - (c) seorang Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang dilantik oleh Ketua Pengarah;
 - (d) seorang Hakim kanan Mahkamah Tinggi Syariah;
 - (e) Ketua Pendakwa Syarie;
 - (f) seorang Peguam Syarie sebagai wakil Peguam-peguam Syarie; dan
 - (g) seorang yang berkemahiran dalam Hukum Syarak.
- (2) Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa.
- (3) Ahli Jawatankuasa yang disebut di dalam subkaedah (1) ini hendaklah beragama Islam.
- (4) Ahli Jawatankuasa yang disebutkan di dalam perenggan (1)(f) dan (g) hendaklah dilantik oleh Majlis.
- (5) Tertakluk kepada kaedah 5, seseorang ahli Jawatankuasa yang dilantik di bawah perenggan (1)(f) dan (g) hendaklah memegang jawatan selama tempoh tiga tahun dan dia adalah layak dilantik semula.

Penamatan khidmat dan peletakan jawatan

5. (1) Pelantikan seseorang ahli Jawatankuasa di bawah perenggan 4(1)(f) dan (g) boleh pada bila-bila masa ditamatkan oleh Majlis tanpa memberi sebarang sebab mengenainya.
- (2) Seseorang ahli Jawatankuasa boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan menghantar notis kepada Majlis melalui Pengerusi Jawatankuasa.

Mesyuarat Jawatankuasa

6. (1) Pengerusi Jawatankuasa hendaklah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa dan jika Pengerusi tidak hadir, ahli yang hadir boleh melantik salah seorang dari mereka untuk mempengerusikan mesyuarat itu.

- (2) Pengerusi dan tiga ahli Jawatankuasa yang lain hendaklah membentuk kuorum bagi mana-mana mesyuarat Jawatankuasa.
- (3) Keputusan mesyuarat Jawatankuasa hendaklah dibuat secara bermesyuarat dan hendaklah secara sebulat suara atau lebih suara ahli yang hadir.
- (4) Tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini dan apa-apa arahan Majlis, Jawatankuasa boleh menetapkan prosedurnya sendiri.

Fungsi Jawatankuasa

7. Jawatankuasa hendaklah mempunyai fungsi seperti berikut:
 - (a) untuk membuat perakuan kepada Majlis mengenai kelayakan mana-mana orang yang memohon untuk dilantik sebagai Peguam Syarie oleh Majlis;
 - (b) untuk membuat perakuan kepada Majlis sama ada nama mana-mana Peguam Syarie itu harus di gugurkan daripada Daftar Peguam Syarie atau sama ada mana-mana Peguam Syarie itu hendaklah digantung dari menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie atau diberi amaran;
 - (c) untuk menjalankan fungsi lain yang berkaitan dengan fungsi yang disebutkan di bawah perenggan (a) dan (b).

BAHAGIAN III

PEGUAM SYARIE

Kelayakan sebagai Peguam Syarie

8. (1) Tertakluk kepada subkaedah (4), mana-mana orang yang memenuhi syarat yang berikut adalah layak untuk menjadi seorang Peguam Syarie:
 - (a) seorang yang beragama Islam;
 - (b) seorang warganegara Malaysia;
 - (c) berkelakuan baik dan tidak pernah disabitkan di Malaysia atau di mana-mana tempat lain atas apa-apa kesalahan jenayah (di bawah Undang-undang bertulis), bukan seorang yang bankrap atau tidak pernah didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan di dalam perenggan 33(6)(a), (b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360];
 - (d) tidak dipecat, hilang kelayakan atau digantung atas kapasitinya sebagai seorang Peguambela dan Peguamcara; dan
 - (e) (i) memiliki Ijazah Sarjana Muda Syariah dari mana-mana Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan di dalam subkaedah (2); atau

- (ii) seorang peguambela dan peguamcara dan mempunyai Diploma Lepas Ijazah dalam bidang Undang-undang Syariah dan amalan dari mana-mana universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan telah menjalani latihan dalam kamar tidak kurang daripada tiga bulan;
- (f) telah lulus ujian bertulis atau temuduga atau kedua-duanya sekali sebagaimana yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.

(2) Penerimaan masuk sebagai Peguam Syarie di bawah subperenggan (1)(e)(i) hendaklah tertakluk kepada syarat berikut:

- (a) jika seseorang itu memiliki Ijazah Sarjana Muda Syariah dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia selain daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dia hendaklah juga memiliki—
 - (i) Diploma Undang-undang Pentadbiran Kehakiman Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa; atau
 - (ii) mana-mana Diploma Lepas Ijazah yang setaraf dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia; dan
 - (iii) telah tamat latihan dalam kamar selama sembilan bulan di mana-mana firma guaman syarie;
- (b) jika seseorang itu memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-undang dan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau setaraf dengannya, dia telah tamat latihan dalam kamar selama sembilan bulan dari mana-mana firma guaman syarie,

dengan syarat Jawatankuasa boleh, menurut budi bicaranya, mengecualikan seseorang berkelayakan daripada menjalani sesuatu tempoh latihan dalam kamar atau sebahagian daripadanya apabila permohonan dibuat kepadanya dengan disokong oleh keterangan yang memuaskan bahawa ada hal keadaan yang mewajarkan tempoh latihan dalam kamar itu dikecualikan atau dipendekkan.

(3) Latihan dalam kamar hendaklah diselia oleh seorang Peguam Syarie yang sedang dan telah menjalankan amalan secara aktif di Malaysia bagi tempoh tidak kurang daripada tujuh tahun sebelum sahaja latihannya bermula.

(4) Penasihat Undang-undang Negeri dan Peguam Persekutuan di Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Selangor atau pegawai yang dilantik di bawah Akta Bantuan Guaman 1971 [Akta 26] hendaklah disifatkan telah dilantik sebagai Peguam Syarie oleh Majlis di bawah Kaedah ini dan kaedah 9 adalah tidak terpakai bagi pegawai itu dan, pegawai itu boleh, jika tugas rasmi memerlukan, mewakili mana-mana pihak dalam mana-mana Mahkamah.

Permohonan

9. (1) Permohonan untuk dilantik sebagai Peguam Syarie hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi Jawatankuasa dengan menggunakan borang yang ditetapkan dalam Jadual 1.

(2) Setiap permohonan hendaklah disokong oleh dua orang penyokong yang mana hendaklah terdiri dari mereka yang berikut:

- (a) Peguam Syarie;
- (b) Peguambela atau Peguamcara yang berdaftar di bawah Akta Profesion Undang-undang 1976 [Akta 166];
- (c) Ahli Dewan Undangan Negeri;
- (d) Ahli Parlimen; atau
- (e) Pegawai kerajaan dalam Kumpulan A.

(3) Tiap-tiap pemohon, selepas permohonannya diserahkan kepada dan diakuterima secara bertulis oleh Pengerusi Jawatankuasa, hendaklah menampalkan satu salinan permohonannya di papan notis setiap Mahkamah Syariah di Selangor selama satu bulan.

Bantahan

10. Apa-apa bantahan mengenai permohonan hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada Pengerusi Jawatankuasa.

Perakuan

11. Jawatankuasa hendaklah mengemukakan perakuannya dalam masa empat belas hari selepas perakuan dibuat kepada Majlis.

Pemberitahuan

12. (1) Majlis hendaklah memaklumkan keputusannya kepada Jawatankuasa.
- (2) Setelah menerima pemakluman daripada Majlis, Pengerusi Jawatankuasa hendaklah memberitahu kepada pemohon keputusan tersebut.

Sijil Peguam Syarie

13. (1) Kecuali mereka yang dilantik menurut subkaedah 8(4), dianggap sebagai telah dilantik menjadi Peguam Syarie dibawah Kaedah-kaedah ini, tiap-tiap orang yang dilantik menjadi Peguam Syarie hendaklah memiliki Sijil Peguam Syarie yang akan dikeluarkan kepadanya oleh Majlis setelah dia menjelaskan fi yang ditetapkan.

(2) Tiap-tiap Sijil Peguam Syarie hendaklah ditandatangani oleh Pengerusi Majlis sebagaimana ditetapkan dalam Jadual 2.

(3) Fi pendaftaran bagi tiap-tiap Sijil Peguam Syarie ialah lima ratus ringgit.

Perisytiharan oleh Mahkamah Tinggi Syariah

14. (1) Kecuali mereka yang dilantik menurut subkaedah 8(4), dianggap sebagai telah dilantik menjadi Peguam Syarie di bawah Kaedah-kaedah ini, tiap-tiap orang yang telah dilantik oleh Majlis sebagai Peguam Syarie hendaklah sebelum dia boleh menjalankan amalan sebagai seorang Peguam Syarie, memohon supaya suatu perisytiharan pelantikannya sebagai seorang Peguam Syarie hendaklah terlebih dahulu dibuat oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

(2) Perisytiharan itu hendaklah dilakukan di Mahkamah terbuka.

Sijil Amalan Guaman Syarie

15. (1) Setiap Peguam Syarie yang telah diisytiharkan penerimaannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah, sebelum dia hadir dan mewakili mana-mana pihak dalam mana-mana Mahkamah, hendaklah memohon untuk mendapatkan Sijil Amalan Guaman Syarie.

(2) Jawatankuasa hendaklah mengeluarkan Sijil Amalan Guaman Syarie mengikut borang dalam Jadual 3 apabila dibayar fi sebanyak satu ratus ringgit.

(3) Sijil Amalan Guaman Syarie yang dikeluarkan di bawah subkaedah (2) hendaklah sah bagi tempoh dua belas bulan dan boleh diperbaharui dengan membayar fi yang ditetapkan dalam kaedah 24.

Daftar Peguam Syarie

16. (1) Setiausaha Jawatankuasa hendaklah menyenggarakan suatu rekod mengenai pendaftaran semua Peguam Syarie, dan rekod itu hendaklah dipanggil "Daftar Peguam Syarie".

(2) Daftar Peguam Syarie hendaklah mengandungi maklumat yang berikut:

- (a) nama;
- (b) nombor kad pengenalan;
- (c) kelulusan;
- (d) nama di bawah mana ia menjalankan amalan atau nama firma;
- (e) alamat surat menyurat;
- (f) tarikh dilantik sebagai Peguam Syarie;
- (g) satu salinan perintah Perisytiharan Masuk oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- (h) Sijil Amalan Guaman Syarie;
- (i) tarikh pengguguran pendaftaran (jika ada);

- (j) maklumat mengenai apa-apa tindakan tatatertib (jika ada) ke atas Peguam Syarie; dan
- (k) butir-butir lain sebagaimana diarahkan oleh Majlis atau Jawatankuasa dari semasa ke semasa.

BAHAGIAN IV

PROSEDUR TATATERTIB

Tindakan tatatertib

17. (1) Majlis boleh, atas sebab yang wajar, mengenakan tindakan tatatertib ke atas mana-mana Peguam Syarie mengikut peruntukan Bahagian ini.

(2) Sebab yang wajar itu boleh ditunjukkan dengan membuktikan bahawa Peguam Syarie itu—

- (a) telah berkelakuan mengikut apa-apa cara yang bertentangan dengan Hukum Syarak;
- (b) telah membuat apa-apa pernyataan awam sama ada secara lisan atau bertulis yang semunasabahnya boleh ditafsirkan sebagai menghina agama Islam atau Majlis;
- (c) telah disabitkan oleh mana-mana Mahkamah di Malaysia atau di mana-mana negara lain atas apa-apa kesalahan jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis;
- (d) telah dengan sengaja atau tanpa apa-apa sebab yang munasabah enggan menjalankan kewajibannya terhadap kliennya;
- (e) telah melanggar tanggungjawabnya kepada Mahkamah yang termasuk apa-apa kegagalannya untuk mematuhi akujanji yang diberikannya kepada Mahkamah;
- (f) telah melakukan dengan perbuatan atau perkataan atau dengan apa-apa cara yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menghina Mahkamah;
- (g) mengenakan fi atau kos yang melampau mengikut semua hal keadaan, dalam ketiadaan apa-apa persetujuan bertulis, berhubung dengan perkhidmatan profesional yang diberikan kepada kliennya;
- (h) tidak jujur atau bertingkah laku secara fraud dalam melaksanakan tugasnya;
- (i) telah menawarkan atau memberi atau bersetuju memberi suapan kepada mana-mana orang kerana telah mendapatkan pekerjaan bagi dirinya atau mana-mana Peguam Syarie lain dalam apa-apa urusan undang-undang;
- (j) telah secara langsung atau secara tidak langsung mendapatkan atau cuba mendapatkan pekerjaan bagi dirinya atau bagi seseorang Peguam Syarie lain melalui atau dengan arahan seseorang yang kepadanya sesuatu saraan kerana mendapatkan pekerjaan itu telah diberi olehnya atau dipersetujui untuk diberi sedemikian;

- (k) telah menerima pekerjaan dalam apa-apa urusan perundangan melalui seorang penarik langganan;
- (l) membenarkan mana-mana orang yang bukan seorang Peguam Syarie mengusahakan atau menjalankan urusan perundangan atas namanya atau firmannya tanpa orang itu berada di bawah kawalannya;
- (m) menjalankan dengan sendiri atau melalui mana-mana orang lain yang diguna khidmat olehnya apa-apa tred, perniagaan atau kerjaya yang pada pendapat Majlis adalah tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai Peguam Syarie;
- (n) telah didapati bersalah oleh Lembaga Disiplin yang ditubuhkan di bawah subseksyen 93(1) Akta Profesion Undang-undang 1976;
- (o) telah diisytiharkan sebagai bankrap dan belum dilepaskan; atau
- (p) telah melanggar atau mungkir mematuhi mana-mana peruntukan Kaedah ini atau mana-mana undang-undang bertulis, jika pada pendapat Majlis pelanggaran atau kemungkiran itu memerlukan tindakan tatatertib.

(3) Dalam apa-apa prosiding di bawah Kaedah ini Majlis boleh, sebagai tambahan kepada fakta kes itu, mengambil kira kelakuan dan watak orang yang berkenaan pada masa yang lalu untuk menentukan perintah yang patut dibuat.

Aduan terhadap Peguam Syarie

18. Apa-apa aduan mengenai kelakuan seseorang Peguam Syarie atas sifat profesionalnya hendaklah dibuat kepada Pengerusi Jawatankuasa secara bertulis.

Siasatan

19. (1) Setelah menerima sesuatu aduan itu, Pengerusi Jawatankuasa hendaklah menyebabkan suatu siasatan diadakan.

(2) Tiap-tiap siasatan oleh Jawatankuasa hendaklah dijalankan secara dan setakat yang difikirkan adil dan munasabah menurut budi bicara mutlaknya dengan syarat bahawa sebelum ia menentukan bahawa siasatan hendaklah diadakan, ia hendaklah:

- (a) mengepos atau menyampaikan kepada Peguam Syarie yang berkenaan—
 - (i) suatu pernyataan bertulis menyatakan isi aduan itu; dan
 - (ii) suatu notis meminta Peguam Syarie yang berkenaan, dalam sesuatu masa (tidak kurang daripada empat belas hari) memberi kepada Jawatankuasa apa-apa jua penjelasan bertulis yang hendak diberinya dan memberitahu Jawatankuasa itu sekiranya ia suka supaya didengar oleh Jawatankuasa itu; dan

- (b) membiarkan masa yang dinyatakan dalam notis itu luput dan memberi Peguam Syarie yang berkenaan peluang yang berpatutan untuk didengar jika ia suka dan memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada apa-apa penjelasan yang mungkin dibuatnya.
- (3) Apabila siasatan telah selesai, Jawatankuasa hendaklah memberi suatu laporan tentang pendapatnya kepada Majlis; dan hendaklah juga membuat perakuannya sama ada Peguam Syarie berkenaan adalah bersalah atau tidak atas kesalahan yang diadukan itu.
- (4) Jika Jawatankuasa membuat perakuan bahawa Peguam Syarie berkenaan didapati bersalah atas kesalahan yang diadukan itu, Jawatankuasa hendaklah juga membuat perakuan mengenai hukuman yang patut dikenakan ke atas Peguam Syarie tersebut.
- (5) Tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini, Jawatankuasa adalah berkuasa untuk mengawal selia prosedurnya sendiri berhubungan dengan perjalanan siasatannya ke atas apa-apa aduan.

Kuasa Majlis mengeluarkan perintah

20. (1) Majlis, apabila menerima laporan dan perakuan Jawatankuasa mengikut kaedah 19, hendaklah membuat mana-mana daripada perintah yang berikut sebagaimana difikirkan adil dan munasabah:

- (a) membuat perintah supaya nama Peguam Syarie berkenaan digugurkan daripada Daftar Peguam Syarie;
- (b) membuat perintah menggantung Peguam Syarie itu daripada menjalankan amalan bagi suatu tempoh yang difikirkan adil dan munasabah;
- (c) memberi amaran kepada Peguam Syarie itu; atau
- (d) membuat apa-apa perintah yang lain yang difikirkan adil dan munasabah.

(2) Dalam membuat apa-apa perintah di bawah Kaedah-kaedah ini, Majlis boleh, selain dari fakta kes itu, mengambil kira kelakuan dan watak orang yang berkenaan itu pada masa yang lalu untuk menentukan perintah yang patut dibuat.

Permohonan untuk dikeluarkan nama dari Daftar

21. (1) Seseorang Peguam Syarie boleh, tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini, memohon kepada Majlis supaya namanya dikeluarkan daripada Daftar Peguam Syarie.

(2) Tiap-tiap permohonan itu hendaklah dibuat secara bertulis dan dikemukakan kepada Pengerusi Jawatankuasa serta disokong dengan affidavit.

(3) Jawatankuasa boleh atas sebab yang baik menghendaki pemohon itu supaya mengiklankan tujuannya hendak membuat permohonan itu mengikut apa-apa cara yang diarahkan oleh Jawatankuasa.

(4) Permohonan itu hendaklah dipertimbangkan oleh Jawatankuasa dan Jawatankuasa kemudiannya hendaklah mengemukakan perakuannya kepada Majlis.

Permohonan untuk dilantik semula sebagai Peguam Syarie

22. (1) Tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini, atas perakuan Jawatankuasa, Majlis boleh jika difikirkan adil dan munasabah melantik semula seseorang itu, yang namanya telah dikeluarkan atau digugurkan dari Daftar Peguam Syarie, sebagai Peguam Syarie.

(2) Sesuatu permohonan supaya seseorang itu dilantik semula sebagai Peguam Syarie hendaklah dibuat mengikut cara yang ditetapkan oleh Kaedah-kaedah ini bagi seseorang yang berhasrat untuk dilantik menjadi Peguam Syarie bagi kali pertamanya; tetapi bagi permohonan yang dibuat di bawah Kaedah ini, permohonan itu hendaklah disokong dengan affidavit yang menerangkan mengapa pemohon ingin dilantik semula untuk menjadi Peguam Syarie.

(3) Fi bagi setiap Sijil Peguam Syarie yang dikeluarkan di bawah kaedah ini ialah satu ribu ringgit.

BAHAGIAN V

PERUNTUKAN AM

Mengemukakan Sijil Amalan Guaman Syarie

23. Setiap Peguam Syarie hendaklah mengemukakan Sijil Amalan Guaman Syarie jika dikehendaki oleh mana-mana Mahkamah Syariah.

Pembaharuan Sijil Amalan Guaman Syarie

24. (1) Tiap-tiap permohonan untuk pembaharui Sijil Amalan Guaman Syarie hendaklah dibuat kepada Jawatankuasa tidak lewat dari dua bulan sebelum tamat tempoh sijil itu.

(2) Permohonan hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan dalam Jadual 4 dan hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi Jawatankuasa.

(3) Fi bagi setiap Sijil Amalan Guaman Syarie yang diperbaharui adalah seperti berikut:

- (a) jika permohonan untuk pembaharuan sijil itu dibuat dalam tempoh ditetapkan oleh subkaedah (1), finya ialah satu ratus ringgit;
- (b) jika permohonan untuk pembaharuan sijil itu dibuat selepas tempoh ditetapkan oleh subkaedah (1), finya ialah seperti berikut;
 - (i) jika permohonan dibuat dalam tempoh kurang dari dua bulan sebelum tamat tempoh sijil itu, finya ialah dua ratus ringgit;

- (ii) jika permohonan dibuat dalam tempoh satu bulan selepas tamat tempoh sijil, finya ialah tiga ratus ringgit;
- (iii) jika permohonan dibuat selepas tempoh yang ditetapkan oleh subperenggan (b)(ii) tetapi dibuat dalam tempoh dua bulan selepas tamat tempoh sijil, finya empat ratus ringgit; dan
- (iv) jika permohonan dibuat selepas tempoh yang ditetapkan oleh subperenggan (b)(iii) tetapi dibuat dalam tempoh tiga bulan selepas tamat tempoh sijil, finya ialah lima ratus ringgit.

(4) Seseorang Peguam Syarie yang gagal memperbaharui Sijil Amalan Guaman Syariennya sehinggalah tamat tempoh tiga bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh subperenggan (3)(b)(iv) tidak akan dibenarkan untuk memperbaharui sijilnya dan namanya hendaklah dianggap sebagai telah dikeluarkan oleh Majlis dari Daftar Peguam Syarie; dan jika dia berhasrat supaya dilantik semula sebagai Peguam Syarie, dia hendaklah memohon mengikut sepertimana yang ditetapkan oleh kaedah 22.

Sekatan

25. (1) Tiada seorang pun boleh menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie atau melakukan apa-apa perbuatan sebagai Peguam Syarie melainkan dia adalah menurut subkaedah 8(4), dianggap sebagai telah dilantik menjadi Peguam Syarie oleh Kaedah-kaedah ini, atau dia telah dilantik dengan sempurnanya sebagai Peguam Syarie mengikut Kaedah-kaedah ini.

(2) Tiada seseorang pun boleh menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie atau melakukan apa-apa perbuatan sebagai Peguam Syarie jika suatu perintah penggantungan ke atasnya di bawah perenggan 20(b) masih berkuat kuasa.

Penalti

26. Mana-mana orang yang melanggar subkaedah 25(1) atau (2) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan, dihukum dengan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dengan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali.

Pemansuhan dan kecualian

27. (1) Kaedah-kaedah Peguam Syarie 1991 [Sel. P.U. 222/1991] dengan ini dimansuhkan.

(2) Seseorang yang kepadanya telah dikeluarkan lesen sebagai Peguam Syarie di bawah Kaedah-kaedah yang dimansuhkan itu hendaklah disifatkan sebagai telah diterima sebagai Peguam Syarie di bawah Kaedah-kaedah ini.



JADUAL 1

[Subkaedah 9(1)]

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI SELANGOR)
2008

BORANG PERMOHONAN UNTUK DITERIMA MASUK
SEBAGAI PEGUAM SYARIE

Sila
Lekatkan
Gambar
Ukuran
Pasport

Pengerusi
Jawatankuasa Peguam Syarie Negeri Selangor

Dengan hormatnya saya memohon untuk dilantik sebagai Peguam Syarie dan dikemukakan butir-butir mengenai diri saya seperti berikut:

(Hendaklah diisi oleh Pemohon dalam Huruf Besar)

1. Nama :
2. Lain-lain nama (jika ada) :
3. No. Kad Pengenalan :
4. Jantina :
5. Tarikh Lahir :
6. Tempat Lahir :
7. Taraf Perkahwinan :
8. Kewarganegaraan :
9. Bangsa :
10. Agama :
11. Nama dan alamat firma
(sekiranya Pemohon seorang
peguambela dan peguamcara) :

12. Alamat surat-menyurat :

13. No. telefon : (a) (r)
 (b) (p)
 (c) (h/p)
 (d) (No. fax)
 (e) (e-mail)

14. Alamat Kediaman :

15. Kelayakan dan Kelulusan :

16. Pengalaman :

17. Butiran lain (jika ada) :

Saya dengan ini mengaku bahawa segala keterangan yang tersebut di atas adalah benar.

Saya juga mengakui bahawa saya—

- (i) tidak pernah disabitkan di Malaysia atau di mana-mana tempat lain atas apa-apa kesalahan jenayah (di bawah mana-mana undang-undang bertulis) yang menjadikannya tidak layak menjadi seorang Peguam Syarie, khususnya, tetapi tidak terhad kepada, sesuatu kesalahan berkenaan dengan penipuan atau kecurangan;
- (ii) bukan sedang menjadi bankrap; atau
- (iii) tidak pernah didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan dalam perenggan 33(6)(a), (b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) Akta Kebankrapan 1967.

Bertarikh:

.....
Tandatangan Pemohon

PERINGATAN:

Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil, testimonial, perakuan dan dokumen lain yang berkaitan yang diperakui sah untuk menyokong permohonannya.



JADUAL 2

[Subkaedah 13(2)]

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI SELANGOR) 2008

SIJIL PEGUAM SYARIE

BAHAWASANYA dengan ini diperakukan bahawa

No. Kad Pengenalan: No. Siri Daftar:
telah diterima sebagai Peguam Syarie di bawah Kaedah-kaedah Peguam
Syarie (Negeri Selangor) 2008 pada hari bulan 20.... dan
sah sehingga dibatalkan oleh Jawatankuasa Peguam Syarie Negeri Selangor.

METERAI

Tarikh dikeluarkan M
H

.....
Pengerusi
Majlis Agama Islam Selangor



JADUAL 3

[Subkaedah 15(2)]

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI SELANGOR) 2008

SIJIL AMALAN GUAMAN SYARIE

Dengan ini diperakui bahawa:

Nama:

No. Kad Pengenalan:

No. Siri Daftar:

Alamat Firma:

Adalah bebas menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie dalam Mahkamah Syariah di seluruh Negeri Selangor berkuat kuasa dari hari bulan 20..... hingga hari bulan 20.....

METERAI

Tarikh dikeluarkan M
H

.....
Pengerusi
Jawatankuasa Peguam Syarie
Selangor



JADUAL 4

[Subkaedah 24(2)]

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI SELANGOR) 2008

PERMOHONAN PEMBAHARUAN SIJIL AMALAN GUAMAN SYARIE

Pengerusi

Jawatankuasa Peguam Syarie Negeri Selangor

Dengan hormatnya saya memohon bagi membaharui Sijil Amalan Guaman Syarie bagi tempoh dua belas bulan berkuat kuasa dari hari bulan..... 20.... hingga hari bulan 20.... dan butiran diri saya adalah seperti berikut:

(Hendaklah diisi oleh Pemohon dengan Huruf Besar)

1. Nama :
2. No. Kad Pengenalan :
3. No. Siri Daftar :
4. No. Sijil Peguam Syarie :
5. Tarikh Tamat Sijil :
6. No. Sijil Amalan Guaman Syarie :
7. No. Faks :
8. E-mel :
9. Nama dan Alamat firma :
10. Alamat Surat-Menyurat :

11. No. Telefon : (a)(P)
 (b)(R)
 (c)(H/P)

12. Alamat Kediaman :

13. Butiran lain (jika ada) :

Saya dengan ini mengaku bahawa saya tidak pernah disabitkan di Malaysia atau di mana-mana negara lain atas apa-apa kesalahan jenayah dan saya bukan seorang bankrap.

Saya mengaku bahawa segala butiran yang tersebut di atas adalah benar.

Bertarikh :

.....
Tandatangan Pemohon

PERINGATAN:

Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil, testimonial, perakuan dan dokumen lain yang diperakui sah untuk menyokong permohonannya.

BAGI KEGUNAAN JAWATANKUASA

Tarikh diterima :
 Amaun Fi :
 No. Resit :
 Dicatatkan dalam Daftar Peguam Syarie pada :

Dibuat 7 November 2008

[JAKESS.100.25/2/18 Jld. 2; P.U Sel. Am 0181/08/TS]

DATO' SETIA HAJI MOHAMAD ADZIB BIN MOHD ISA
Pengerusi
Majlis Agama Islam Selangor